



LAPORAN AKSI PERUBAHAN

**PENGUATAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
MELALUI PENYUSUNAN
SATU DATA MENARA
DENGAN PEMETAAN ONLINE “MY MAPS”
DI KABUPATEN NGAWI**

Oleh

YESI WIDYARTI, ST., M.M.

NIP. 19790324 200604 2 008

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
ANGKATAN II
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Implementasi Aksi Perubahan Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi melalui Penyusunan Satu Data Menara dengan Pemetaan Online “My Maps” di Kabupaten Ngawi.

Laporan Implementasi Aksi Perubahan disusun untuk memenuhi tugas sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu dan memberikan kesempatan, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Implementasi Aksi Perubahan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Mohammad Sadli, ST. MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi sebagai Mentor yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis;
2. Bapak Ir. Gunawan, MA selaku Coach yang telah membimbing dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis; dan
3. Seluruh Pejabat dan staf di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, berbagai bentuk saran dan masukannya yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Jakarta, November 2022

Penulis,

Yesi Widyarti, ST.,M.M.
NIP. 197903242006042008

DAFTAR TABEL
LEMBAR PERSETUJUAN
EVALUASI IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN (RAP)
KINERJA ORGANISASI

JUDUL : Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi melalui Penyusunan Satu Data Menara dengan Pemetaan Online “My Maps” di Kabupaten Ngawi

NAMA : Yesi Widyarti, ST.,M.M.

N.I.P. : 19790324 200604 2 008

GOL./PANGKAT : Pembina (IV/a)

JABATAN : Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi

UNIT KERJA : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi

Disetujui untuk disampaikan pada Seminar Implementasi Aksi Perubahan (RAP) Kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2022.

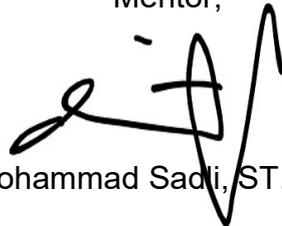
Jakarta, 5 November 2022

Coach,



Ir. Gunawan, MA

Mentor,



Mohammad Sadi, ST.,MT.

**LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN (IAP)
KINERJA ORGANISASI**

JUDUL : Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi melalui Penyusunan Satu Data Menara dengan Pemetaan Online “My Maps” di Kabupaten Ngawi

NAMA : Yesi Widyarti, ST.,M.M.

N.I.P. : 19790324 200604 2 008

GOL./PANGKAT : Pembina (IV/a)

JABATAN : Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi

UNIT KERJA : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi

Telah diseminarkan dan disempurnakan berdasarkan masukan dari Penguji, Coach dan Mentor pada tanggal 5 November 2022.

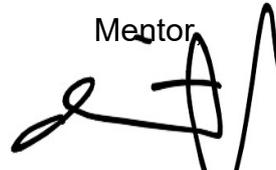
Jakarta, 5 November 2022

Coach,



Ir. Gunawan, MA

Mentor,



Mohammad Sadli, ST., MT.

Penguji,

DR. Tutik Lestari, M.Pd.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tim kerja aksi perubahan.....	9
Tabel 2.	Strategi komunikasi.....	15
Tabel 3.	Strategi Pengembangan Potensi Diri	18
Tabel 4.	Prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan tim kerja aksi perubahan	8
Gambar 2.	Peta stakeholders	10
Gambar 3.	Peta stakeholders setelah aksi perubahan	15
Gambar 4.	Strategi Pengembangan Potensi Diri.....	17

DAFTAR FOTO

Foto 1.	Konsultasi dengan mentor	19
Foto 2.	Undangan rapat internal	20
Foto 3.	Rapat internal	21
Foto 4.	Rekap daftar hadir rapat internal	21
Foto 5.	Form pernyataan dukungan internal	22
Foto 6.	Rekap pernyataan dukungan internal	22
Foto 7.	Pernyataan dukungan internal	23
Foto 8.	Notulen rapat internal	24
Foto 9.	Publikasi aksi perubahan di website DPUPR	24
Foto 10.	Rapat pembentukan tim efektif	25
Foto 11.	Tim administrasi/ hukum menyusun draft SK tim efektif ...	26
Foto 12.	Draft SK tim efektif.....	27
Foto 13.	Penandatanganan SK tim efektif	28
Foto 14.	SK tim efektif yang telah ditetapkan.....	29
Foto 15.	Brainstorming dengan tim efektif	30
Foto 16.	Tim administrasi/ hukum menyusun SOP	30
Foto 17.	Rencana tindak tim penyusunan SOP	31
Foto 18.	Penilaian kebutuhan organisasi	31
Foto 19.	Daftar kebutuhan pengembangan SOP	32
Foto 20.	Identifikasi SOP	33
Foto 21.	Identifikasi SOP berdasar tugas dan fungsi.....	33

Foto 22.	Draft SOP pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	34
Foto 23.	Draft SOP pengelolaan peta online My Maps	35
Foto 24.	Format daftar simak pengawasan menara	36
Foto 25.	Format rekap data menara telekomunikasi.....	36
Foto 26.	Format laporan akhir hasil pengawasan menara.....	36
Foto 27.	Format surat rekomendasi hasil pengawasan	37
Foto 28.	Uji coba SOP pengawasan menara.....	37
Foto 29.	Uji coba penggunaan daftar simak	38
Foto 30.	Penandatanganan SOP oleh Kepala Dinas PUPR	38
Foto 31.	SOP yang telah disahkan	39
Foto 32.	Tim IT dan Tim survey belajar aplikasi My maps.....	39
Foto 33.	Tim survey merekap data menara	40
Foto 34.	Overlay data menara telekomunikasi.....	41
Foto 35.	Data menara telekomunikasi belum teridentifikasi.....	41
Foto 36.	Rekap data menara telekomunikasi format Kominfo	42
Foto 37.	Rekap data menara telekomunikasi sesuai format baku DPUPR	43
Foto 38.	Surat permohonan sinkronisasi data menara	45
Foto 39.	Peta online menara telekomunikasi belum teridentifikasi .	45
Foto 40.	Peta online tambahan data menara telekomunikasi teridentifikasi.....	46
Foto 41.	Pasal pembongkaran menara telekomunikasi	47
Foto 42.	Cek ulang data menara telekomunikasi.....	52

Foto 43.	Uji coba penggunaan My Maps untuk monitoring	53
Foto 44.	Surat permohonan link zoom	54
Foto 45.	Materi paparan rapat konsolidasi.....	54
Foto 46.	Form daftar hadir rapat konsolidasi	55
Foto 47.	Link zoom meeting dari Dinas Kominfo	56
Foto 48.	Surat undangan rapat konsolidasi	57
Foto 49.	Tangkapan layar saat zoom meeting.....	58
Foto 50.	Tanggapan Kabid Perijinan DPMPTSP	59
Foto 51.	Tanggapan Kabid P2D Badan Keuangan.....	59
Foto 52.	Tanggapan Kabid Penegakan Perda Satpol PP	60
Foto 53.	Tanggapan perwakilan PT. Protelindo.....	61
Foto 54.	Tanggapan BPS melalui WA	62
Foto 55.	Draft Berita Acara Kesepakatan	63
Foto 56.	Berita Acara Kesepakatan	63
Foto 57.	Group WA menara telekomunikasi Ngawi	64
Foto 58.	Draft SK Bupati Satu Data Menara Telekomunikasi	65
Foto 59.	Draft Lampiran SK bupati	65
Foto 60.	Surat pengantar SK Bupati	66
Foto 61.	SK Bupati Satu Data Menara Telekomunikasi	67
Foto 62.	Publikasi data menara telekomunikasi di website DPUPR	68
Foto 63.	Publikasi data menara telekomunikasi di Portal Data Ngawi	68
Foto 64.	Dukungan dari Bupati Ngawi	76

Foto 65.	Dukungan dari Wakil Bupati Ngawi.....	77
Foto 66.	Dukungan dari Badan Keuangan Kab. Ngawi	77
Foto 67.	Dukungan dari Satpol PP Kab. Ngawi	78
Foto 68.	Dukungan dari DPMPTSP Kab. Ngawi.....	78
Foto 69.	Dukungan dari BPS Kab. Ngawi.....	79

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR FOTO	vii
DAFTAR ISI.....	xi
EXECUTIVE SUMMARY	xiv
A. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	1
1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1
2. Pengelolaan Budaya Kerja.....	4
3. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi	7
4. Strategi Pengembangan Potensi Diri	15
B. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	18
1. Capaian dalam Perbaikan Kinerja Organisasi.....	18
a. Deskripsi capaian hasil perubahan	18
1) Persiapan pelaksanaan kegiatan	19
a) Konsultasi dengan mentor.....	19
b) Koordinasi dengan internal.....	20
2) Pembentukan Tim Efektif	25
a) Menyusun draft SK Tim Efektif.....	25

b)	Penetapan SK Tim Efektif	27
3)	Koordinasi dengan Tim Efektif.....	29
a)	Menyusun draft SOP.....	29
b)	Pengujian SOP.....	37
c)	Penetapan SOP	38
d)	Mengenalkan pemetaan online My Maps.....	39
e)	Merekap data menara telekomunikasi	40
4)	Koordinasi dengan Stakeholder Eksternal.....	44
a)	Persiapan pelaksanaan sinkronisasi data menara .	44
b)	Sinkronisasi data menara telekomunikasi	45
5)	Melakukan Pemetaan Online My Maps	47
a)	Input data menara telekomunikasi	47
b)	Cek ulang data menara telekomunikasi	52
c)	Finalisasi pemetaan online My Maps	53
6)	Melakukan Rapat Konsolidasi	53
a)	Persiapan acara rapat konsolidasi.....	53
b)	Melaksanakan rapat konsolidasi	57
c)	Membuat kesepakatan bersama.....	62
7)	Penyusunan SK Bupati Satu Data Menara	
	Telekomunikasi.....	64
a)	Penyusunan draft SK Bupati Satu Data Menara	
	Telekomunikasi	64
b)	Penetapan SK Satu Data Menara	
	Telekomunikasi	66

c) Publikasi hasil inovasi	67
b. Deskripsi Kepemimpinan.....	69
2. Manfaat Aksi Perubahan.....	74
a. Manfaat internal.....	74
b. Manfaat eksternal	74
C. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	75
1. Penyampaian hasil inovasi.....	75
2. Dukungan stakeholders eksternal	76
3. Rencana di tahap jangka menengah.....	79
4. Rencana di tahap jangka panjang.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	

EXECUTIVE SUMMARY

Kebutuhan akan layanan telekomunikasi di Indonesia menunjukkan tren semakin meningkat. Tentu saja hal ini membutuhkan adanya pengawasan dan pengendalian yang intensif dari pemerintah daerah agar keberadaan menara telekomunikasi lebih terkendali dan tidak mengganggu keselamatan warga masyarakat setempat.

Aksi perubahan ini dilatarbelakangi oleh kondisi saat ini dimana terdapat perbedaan persepsi antar OPD terkait data menara telekomunikasi di Kabupaten Ngawi yang mana kondisi demikian menimbulkan kegaduhan di masyarakat serta dampak terburuknya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu terobosan inovasi yang kami buat adalah dengan penyusunan satu data menara telekomunikasi melalui pemetaan online My Maps. Diharapkan melalui terobosan ini Pemerintah daerah Kabupaten Ngawi mampu menyediakan data yang baik dan akurat terkait menara telekomunikasi sehingga kepercayaan publik kepada pemerintah daerah Kabupaten Ngawi akan meningkat.

Tujuan jangka pendek aksi perubahan ini menetapkan satu data menara telekomunikasi dengan SK Bupati. Output dari aksi perubahan di jangka pendek adalah terwujudnya SOP pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, SOP Pengelolaan Peta Online My Maps, Pendataan menara telekomunikasi dalam peta online My Maps, dan SK Bupati tentang Satu Data Menara Telekomunikasi. Adapun tujuan jangka pendek ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Kegiatan diawali konsultasi dengan mentor dan melakukan rapat internal sekaligus pembentukan tim efektif. Tim efektif ini bertugas mendukung terwujudnya aksi perubahan mulai dari membuat SOP, melakukan pemetaan online My Maps, juga menyusun SK Bupati Satu Data Menara Telekomunikasi. Pendataan yang dilakukan secara sinergis antara tim dengan provider telah mewujudkan satu data menara yang ditetapkan oleh Bupati Ngawi dalam bentuk surat keputusan yang akan diperbarui setiap tahun.

Secara umum aksi perubahan ini akan memberikan manfaat untuk internal maupun eksternal. Untuk internal dengan adanya SK satu data menara telekomunikasi Kabupaten Ngawi akan mendukung kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Dinas PUPR sekaligus sebagai alat evaluasi kegiatan dimaksud, serta menjadi bahan koordinasi dengan OPD lain dalam rangka membentuk jejaring kerja untuk menguatkan organisasi. Sedangkan bagi pihak eksternal, dengan adanya SK Satu data menara telekomunikasi Kabupaten Ngawi akan menjadi basis data bagi OPD lain sebagai sarana mendapatkan informasi yang valid dan ajang saling menukar informasi terkait menara telekomunikasi mendasar data yang sama, sehingga pada akhirnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan meningkat.

Untuk menjamin keberlanjutan aksi perubahan maka pada tahap jangka menengah dilakukan pada tahun 2023 yaitu akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi melalui penelusuran potensi pajak dan retribusi yang hilang karena menara telekomunikasi yang tidak terdata dengan baik serta melakukan evaluasi atas pemanfaatan satu data menara telekomunikasi. Sedangkan pada tahap jangka panjang yaitu setelah tahun 2023 adalah untuk meningkatkan kepatuhan para pemilik menara telekomunikasi terhadap aspek hukum di Kabupaten Ngawi serta melakukan penyempurnaan pemanfaatan satu data menara telekomunikasi. Kepatuhan yang dimaksud adalah kepatuhan dari sisi aturan tata bangunan, dari aspek pajak dan retribusi, serta dari aspek perijinan.

Aksi perubahan ini sangat didukung oleh stakeholder terkait, dan mereka siap untuk memanfaatkan inovasi ini untuk meningkatkan kinerja organisasinya masing-masing. Semoga segala dukungan dari semua pihak baik internal maupun eksternal bisa mewujudkan keberlanjutan Satu Data Menara Telekomunikasi di Kabupaten Ngawi dan terus terjadi sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dengan para pemilik menara beserta asosiasi yang menaunginya sehingga mampu mewujudkan Kabupaten Ngawi lebih baik.

A. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

Dalam proses implementasi aksi perubahan diharapkan terjadi perubahan dalam proses kepemimpinan organisasi sehingga kinerja organisasi menjadi lebih baik. Kepemimpinan transformasional diharapkan mampu membangun integritas dan akuntabilitas organisasi, mampu mengelola budaya kerja, serta membangun jejaring kerja dan melakukan kolaborasi sehingga kinerja organisasi makin meningkat. Dalam melaksanakan tahapan kegiatan aksi perubahan selama 2 bulan didapatkan pengalaman dalam memimpin organisasi terkait ketiga hal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Definisi Integritas sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 60 Tahun 2020 adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/ atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya.

Pembangunan integritas pegawai ASN adalah upaya untuk mewujudkan, memperkuat, dan mempertahankan nilai dasar, daya nalar dan keberanian moral ASN, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : 1) membangun kesadaran; 2) membangun pemahaman; 3) membangun penerimaan; dan 4) membangun kepemilikan.

b. Membangun kesadaran

Untuk mewujudkan tujuan jangka pendek dari aksi perubahan ini dilakukan pendekatan kepada bawahan langsung dan rekan kerja agar terjadi kesamaan persepsi antar pribadi atau pun organisasi. Untuk itulah dibentuk tim efektif yang dibekali dengan kesadaran diri akan tanggung

jawab sebagai ASN yang berkomitmen bersama mewujudkan organisasi kerja yang berkinerja tinggi. Untuk mencapai hal tersebut pertama yang dilakukan pemimpin aksi perubahan adalah membuka kesadaran tentang arti integritas, tentang kode etik ASN yang harus dijunjung tinggi, serta nilai-nilai dasar seorang ASN dan pengaruhnya terhadap organisasi. Kemudian pemimpin aksi perubahan berusaha menyamakan persepsi dan memberikan gambaran bagaimana seorang ASN yang berintegritas. Menjunjung tinggi integritas dimaknai sebagai perilaku sebagai berikut:

- 1) Bekerja/ bertindak sesuai aturan/ norma yang berlaku;
- 2) Dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan dalam setiap perkataan dan tindakannya;
- 3) Konsisten antara perkataan dan perbuatan;
- 4) Tidak mengingkari janji/ kesepakatan/ kesanggupan yang telah dilakukan;
- 5) Berani menyatakan fakta apa adanya, jujur, dan transparan.

c. Membangun pemahaman

Pada tahap ini, pemimpin aksi perubahan berusaha menanamkan pemahaman yang baik dan sama akan rencana aksi perubahan serta tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Mendasar pada bekal kesadaran diri akan integritas yang telah didapatkan pada saat pembentukan tim efektif, diharapkan tiap pribadi akan mampu menerjemahkan kegiatan yang dibebankan kepadanya dengan penuh integritas. Membangun pemahaman dilakukan melalui rapat internal maupun

sharing informal dengan memberikan gambaran perilaku berintegritas sehubungan dengan aksi perubahan yang dilakukan:

- 1) Setiap tindakan dalam pelaksanaan aksi perubahan tidak boleh melanggar aturan.
- 2) Semua hal yang dilaksanakan harus menjunjung tinggi kejujuran, semua tahapan kegiatan harus didukung dengan bukti yang benar dan valid.
- 3) Terbuka, jika menemui kendala disampaikan kepada pemimpin aksi perubahan untuk dibahas bersama anggota tim lainnya, laporan yang disajikan harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- 4) Disiplin dan mematuhi jadwal yang telah ditetapkan, menyelesaikan semua tugas yang diberikan, dapat bekerjasama dengan anggota tim lain dalam penyelesaian tugas.

d. Membangun penerimaan

Pada tahapan membangun penerimaan diharapkan pemimpin aksi perubahan mampu membawa stafnya untuk menginternalisasi integritas ke dalam keyakinan masing-masing, ke dalam lingkungan kerjanya serta mampu mencerminkan pribadi seorang ASN yang berintegritas. Pemimpin aksi perubahan harus meyakinkan dirinya bahwa semua anggotanya selalu menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas yang diembannya dengan melakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan terhadap staf yang ditugasinya (*mentoring* dan *coaching*).

e. Membangun kepemilikan

Tujuan akhir dari membangun integritas adalah adanya rasa

yang tertanam dalam hati kecil dan terbawa dalam alam bawah sadar kita tentang pentingnya integritas bagi seorang ASN. Di tahap ini seorang pemimpin aksi perubahan harus mampu menekankan pada diri sendiri maupun stafnya, agar integritas yang telah dimengerti, dipahami, dan diyakini akan tetap dipegang teguh dan menjadi karakter insan PUPR Kabupaten Ngawi. Pemimpin aksi perubahan harus siap menjadi *role model* seorang pemimpin yang berintegritas sesuai dengan amanat reformasi birokrasi.

2. Pengelolaan Budaya Kerja

Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi pada prinsipnya adalah pelayanan terhadap publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada beberapa jenis pelayanan publik yang diselenggarakan untuk masyarakat. Kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi termasuk dalam jenis pelayanan administratif yang mana pengguna jasa layanan yaitu para provider mendapatkan layanan pengawasan konstruksi fisik bangunan menara dan sebagai imbalannya mereka membayarkan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang masuk pada retribusi daerah.

Aksi perubahan ini dilakukan dalam rangka perbaikan pelayanan publik dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Diharapkan kinerja pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi menjadi lebih baik dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh pemimpin aksi

perubahan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi memiliki motto “ Bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat, sigap membangun Negeri Ngawi Ramah”. Motto ini diharapkan menjadi budaya organisasi yang melekat pada pribadi masing-masing insan DPUPR Kabupaten Ngawi. Secara rinci penerapan budaya kerja insan DPUPR dalam bentuk motto tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bekerja keras

- Kesadaran untuk selalu berusaha agar setiap tugas dilaksanakan secara optimal untuk mencapai target (output, outcome) yang telah ditetapkan;
- Tidak monoton dan selalu mencari ide-ide baru dalam pelaksanaan/ penyelesaian tugas;
- Tidak takut untuk mencoba menerapkan cara baru dalam bekerja;
- Tidak cepat menyerah jika menghadapi kendala, tetapi selalu berusaha mencari jalan keluar.

b. Bergerak cepat

- Berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sesuai prosedur (cepat, mudah, pasti);
- Kemauan untuk belajar menambah informasi, pengetahuan dan ketrampilan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat;
- Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan orang lain/ unit kerja lain dalam pelaksanaan tugas;
- Berusaha mencapai output / hasil kerja yang maksimal sesuai rencana yang telah ditetapkan.
- Mengerjakan tugas dengan cermat dan teliti tetapi tidak lamban;
- Tidak menunda pelaksanaan tugas;

c. Bertindak tepat

- Memecahkan masalah berdasarkan data dan informasi yang valid;
- Cepat dalam mengambil keputusan, tetapi tetap berdasarkan pertimbangan yang matang;
- Dalam mengambil keputusan didasarkan pada analisis dan pertimbangan yang objektif;

d. Sigap membangun negeri Ngawi Ramah

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap sigap dan cepat.
- Memaknai kesetiaan dan loyalitas kepada bangsa dan Negara dengan melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya;
- Berani menanggung resiko yang timbul terkait dengan tugas yang dilaksanakan.

Upaya yang dilakukan pemimpin aksi perubahan adalah berusaha menginternalisasi budaya kerja ini ke dalam diri pribadi masing-masing yang akan selalu menginspirasi ASN dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, utamanya dalam melaksanakan tahapan kegiatan aksi perubahan di Dinas PUPR Kabupaten Ngawi.

Aksi perubahan yang dilakukan kali ini bertujuan menyamakan persepsi antar stakeholder terkait data menara telekomunikasi di Kabupaten Ngawi. Sejalan dengan hal tersebut, perwujudan tetralogi Dinas PUPR bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat, sigap membangun Negeri Ngawi Ramah, yang diimplementasikan dalam aksi perubahan ini adalah:

- a. Insan DPUPR Kabupaten Ngawi siap **bekerja keras** bersama-sama mewujudkan kesamaan persepsi antara banyak stakeholder terkait dengan data menara telekomunikasi;

- b. Kemudian **bergerak secara cepat** melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi untuk mendata kondisi fisik menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Ngawi sebagai bentuk tanggung jawab tugas dan fungsi organisasi.
- c. Ternyata setelah dilakukan sinkronisasi data didapatkan ketidaksamaan persepsi terkait data menara telekomunikasi yang ada, sehingga pemimpin perlu **bertindak tepat** dengan melakukan aksi perubahan melalui penguatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi melalui penyusunan satu data menara dengan pemetaan online “My Maps” di Kabupaten Ngawi;
- d. Semua ini dilakukan dengan **sigap untuk mencapai tujuan organisasi** yang berkinerja tinggi serta membangun Negeri Ngawi Ramah.

Selanjutnya, pemimpin aksi perubahan berperan menjadi agen perubahan yang mendorong internalisasi serta implementasi budaya kerja insan DPUPR kepada anggota tim, dengan komunikasi efektif yang intens, serta memberikan keteladanan.

3. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi

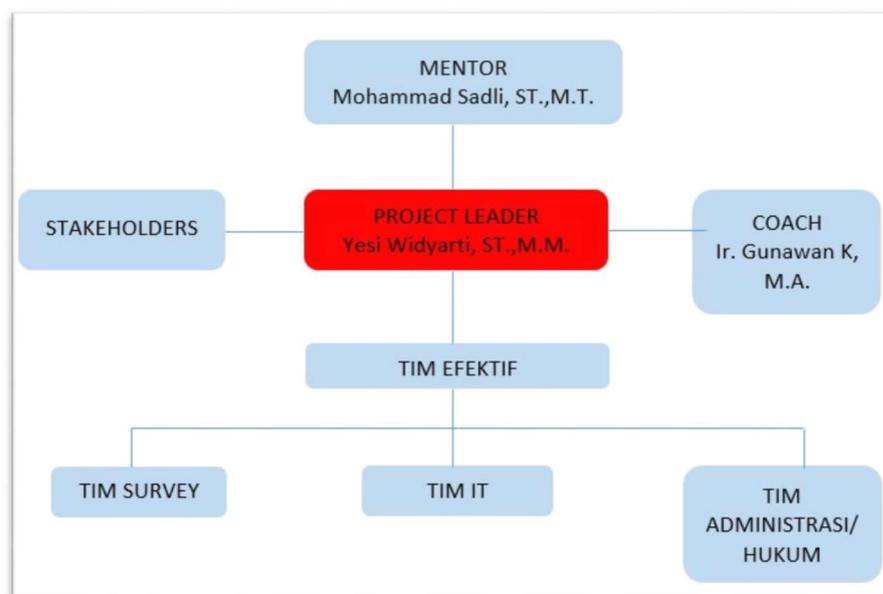
Proses melaksanakan aksi perubahan tidak terlepas dari fungsi manajemen. Bagaimana seorang pemimpin aksi perubahan mengelola anggota timnya, mengelola permasalahan yang muncul, dan bagaimana mengelola hubungan antar pribadi dan organisasi sehingga tercapai tujuan aksi perubahan yang diharapkan.

Untuk mencapai tujuan aksi perubahan diperlukan tim yang solid, memiliki kesamaan visi dan misi, dan kerjasama yang baik antar

anggota tim. Tanpa tim yang solid serta kolaborasi yang baik tidak akan mampu pemimpin aksi perubahan melalui permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan aksi perubahannya. Strategi membangun kolaborasi tim dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu:

a. Membentuk Tim Kerja

Secara sederhana tim dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan suatu proses kerja bersama dimana mereka saling bertanggung jawab satu sama lain. Dalam sebuah tim kerja, seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing yang ditujukan semata-mata untuk meraih tujuan tim, yang merupakan tujuan bersama. Rasa memiliki terhadap tujuan tim harus tertanam pada setiap anggota sehingga lahirlah apa yang disebut sebagai tanggung jawab dan kerelaan untuk berkorban dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Adapun tim yang bekerja sama dalam aksi perubahan ini adalah seperti dijelaskan pada bagan berikut:



Gambar 1
Bagan tim kerja aksi perubahan

Adapun peran dan tugas tim kerja, secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

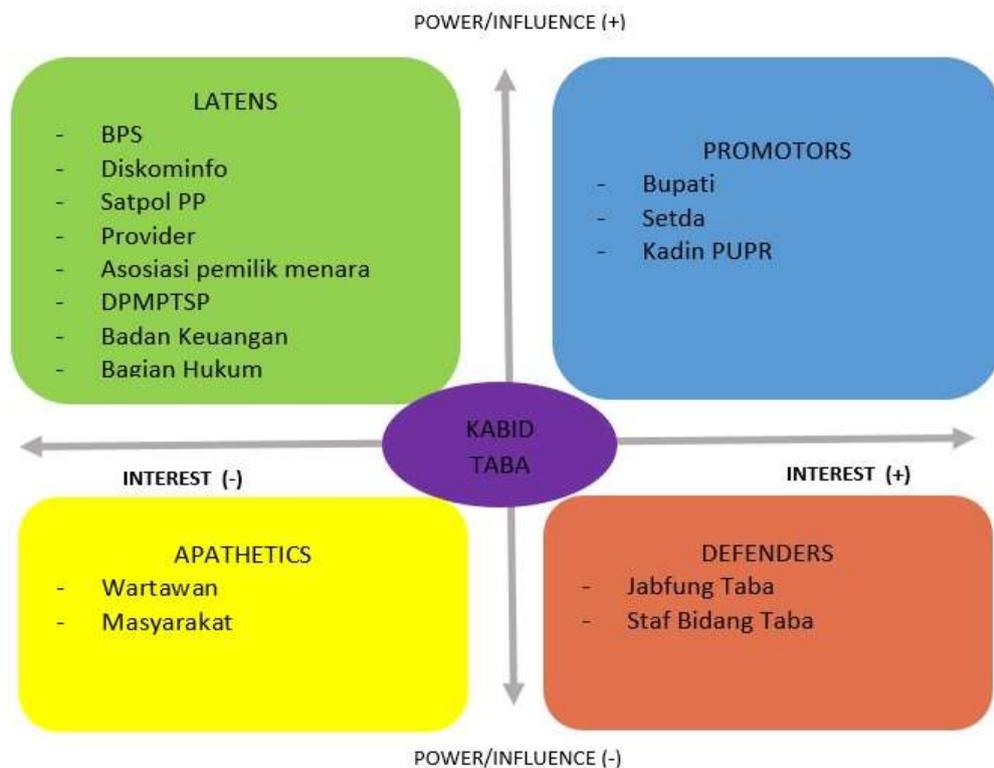
<i>Mentor</i>	Mohammad Sadli, ST.,M.T.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan, dukungan dan pengawasan dalam aksi perubahan. 2. Membantu menyelesaikan hambatan/ kendala dalam aksi perubahan 3. Memantau jalannya aksi perubahan 4. Memberikan dukungan secara berkelanjutan terhadap aksi perubahan yang akan dilakukan
<i>Coach</i>	Ir. Gunawan, MA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bimbingan dan arahan terkait dengan rancangan aksi yang akan dilakukan 2. Membantu menyelesaikan masalah ketika ada hambatan atau kendala ketika pelaksanaan kegiatan 3. Mengevaluasi kegiatan secara menyeluruh
<i>Project Leader</i>	Yesi Widyarti, ST.,M.M.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan aksi perubahan 2. Koordinator tim efektif aksi perubahan
Tim Kerja (<i>Team Work</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Survey <ul style="list-style-type: none"> - Soni W, ST. - Agung N, ST. - Yoyok H - Hamdan I - Jumiran - Hendi TC 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survey lokasi dan kondisi eksisting menara telekomunikasi; 2. Melaporkan rekap data survey kepada tim IT (Informasi Teknologi).
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tim IT <ul style="list-style-type: none"> - Arif A, ST. - Dwi Mide F, ST. - Mahfud R, ST. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukkan data hasil survey pada aplikasi peta online “My Maps”; 2. melakukan ujicoba dan finalisasi peta online “My Maps” sebelum dimanfaatkan.
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tim Administrasi/ Hukum <ul style="list-style-type: none"> - Astuti P, ST.,MM. - Rizka DK - Sutini 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun draft SK satu data menara telekomunikasi di Kabupaten Ngawi 2. Membuat dokumen administratif kegiatan penyusunan satu data menara telekomunikasi Kabupaten Ngawi Tahun 2022.

Tabel 1

Tim Kerja Aksi Perubahan

b. Membangun Kolaborasi

Upaya penguatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi melalui penyusunan satu data menara dengan pemetaan online “My Maps” tidak akan berhasil tanpa jejaring kerja yang efektif. Dibutuhkan kerjasama dengan pihak eksternal maupun internal. Implementasi aksi perubahan ini dapat berhasil sesuai target berkat dukungan dari berbagai stakeholder terkait. Sesuai rancangan aksi perubahan yang telah dilakukan, telah dipetakan stakeholder sesuai kepentingan dan pengaruhnya terhadap aksi perubahan yang dilakukan.



Gambar 2
Peta Stakeholder

Beberapa stakeholder yang terlibat dalam aksi perubahan ini adalah terdiri dari 6 (enam) dinas/ badan dan 10 (sepuluh) provider serta asosiasi menara yang menaunginya.

- DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki urusan terkait perijinan usaha menara telekomunikasi. Jadi semua menara telekomunikasi yang berdiri di wilayah Kabupaten Ngawi wajib memiliki usaha yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Kepala DPMPTSP. Oleh karena itu keberadaan DPMPTSP sangat vital dalam usaha pertelekomunikasian ini. Seharusnya tidak ada satu pun menara telekomunikasi yang luput dari pendataan yang dilakukan oleh DPMPTSP terkait perijinan usahanya.

- BADAN KEUANGAN

Menurut Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2012 pasal 3 disebutkan bahwa “Semua bangunan termasuk menara telekomunikasi wajib membayar pajak dan retribusi daerah”. Pajak yang dimaksud disini adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan aturan mengenai retribusi sendiri termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum pada pasal 54 sampai dengan pasal 59 dijelaskan tentang hak dan kewajiban pemda dan pemilik menara. Pemilik menara memiliki hak memanfaatkan ruang sebagai lokasi berdirinya menara sedangkan kewajiban pemilik menara adalah membayar retribusi atas jasa pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

- SATPOL PP

Satpol PP sebagai penegak perda memiliki tanggung jawab salah satunya dengan adanya menara telekomunikasi ini. Tanggung jawab Satpol PP adalah pada monitoring objek terhadap kepatuhan terhadap peraturan-peraturan perundangan yang berlaku di Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu Satpol PP sangat membutuhkan adanya data menara telekomunikasi yang valid untuk menunjang kelancaran kegiatannya.

- DINAS KOMINFO

Peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai wali data dalam skema Satu Data Kabupaten Ngawi. Tugas Dinas Kominfo sebagai pengumpul data dan memfasilitasi pendataan yang dilakukan sektoral oleh OPD lain. Sekaligus setelah data terverifikasi data ini dipublikasikan oleh Kominfo melalui Portal Data Ngawi.

- BAGIAN HUKUM

Sebagai tim penasihat atau pertimbangan terhadap aspek hukum diperlukan organisasi perangkat daerah yang membidangnya yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Bagian Hukumlah yang memberikan masukan ketika mungkin terjadi permasalahan yang bersinggungan dengan hukum di lapangan.

- BPS

Badan Pusat Statistik adalah badan yang secara resmi memiliki kewenangan merilis Ngawi Dalam Angka setiap tahunnya untuk keperluan penduduk Ngawi. Terkait dengan menara telekomunikasi sampai dengan saat ini data menara telekomunikasi belum pernah dirilis di Ngawi Dalam Angka. Pada kesempatan kali ini salah satu manfaat yang bisa diharapkan adalah tersedianya data yang valid sebagai sumber data BPS rilis buku Ngawi Dalam Angka.

- PROVIDER

Provider adalah pemilik menara. Pemilik menara di Kabupaten Ngawi ada 10 perusahaan yang sebagian besar tersebar di dua kota besar yaitu Jakarta dan Surabaya. Selebihnya ada yang berkantor di Medan. Sehubungan dengan letak lokasi yang jauh dari jangkauan Kabupaten Ngawi maka diperlukan media yang efektif sebagai

wadah koordinasi antara provider dengan pemerintah daerah sehingga tercipta sinergitas yang tinggi antar keduanya.

- **ASOSIASI MENARA**

Asosiasi menara adalah wadah/ organisasi yang menaungi beberapa pemilik menara di dalamnya. Dengan adanya asosiasi menara ini lebih memudahkan koordinasi dengan provider karena ada organisasi yang mengelola provider-provider tersebut secara aktif.

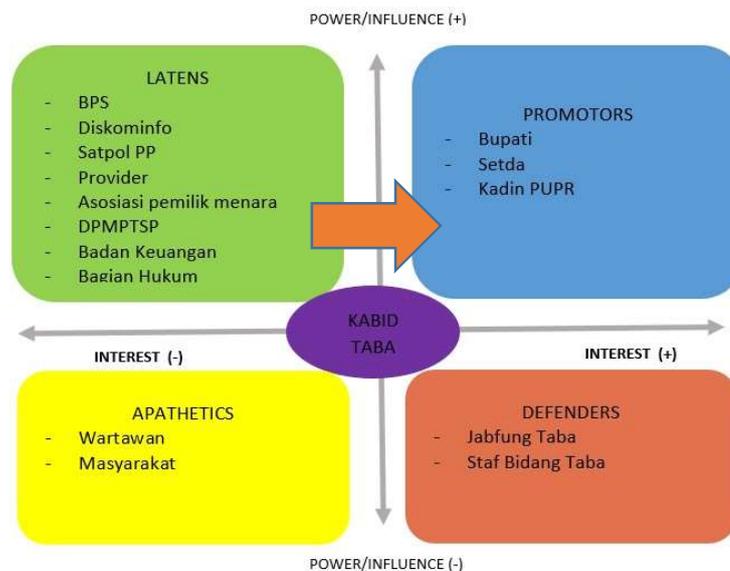
Untuk mempengaruhi stakeholder yang tidak begitu memiliki kepentingan pada aksi perubahan kita namun mereka memiliki pengaruh yang besar pada keberhasilan aksi perubahan yang akan kita lakukan (latens) diperlukan strategi komunikasi yang efektif sehingga komunikasi bisa dengan mudah memahami maksud komunikator. Kesamaan frekuensi antara komunikasi dan komunikator sangat dibutuhkan untuk memiliki kesamaan visi dan misi dalam tim dan tujuan dibentuknya tim dapat tercapai. Pemimpin aksi perubahan melakukan strategi komunikasi untuk masing-masing kuadran stakeholder untuk mencapai tujuannya sebagai berikut:

Stakeholder	Strategi Komunikasi
Promoters	<ul style="list-style-type: none"> ▪ memberikan informasi untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang diusulkan sangat urgent, dan menjadi kunci terwujudnya kesamaan persepsi terkait data menara yang akan berdampak pada naiknya kepercayaan publik terhadap pemerintah

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aktif berkomunikasi dan meminta masukan atas pelaksanaan aksi perubahan dan menyesuaikan pelaksanaan apabila masukan merupakan kritik membangun ▪ Melaporkan hasil secara berkala
Latens	<ul style="list-style-type: none"> ▪ memberikan informasi mengenai maksud, tujuan, manfaat, output yang dihasilkan serta impact bagi pemerintah daerah ▪ Perlakukan kelompok ini dengan baik
Defenders	<ul style="list-style-type: none"> ▪ memberikan pemahaman dan pengertian serta motivasi bahwa kegiatan aksi perubahan ini harus dilaksanakan karena berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pemimpin aksi perubahan. ▪ memberikan apresiasi serta mengingatkan secara terus-menerus pencapaian upaya agar aksi perubahan dapat diselesaikan tepat waktu ▪ Melakukan diskusi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan aksi perubahan
Apathetics	<ul style="list-style-type: none"> ▪ memberikan informasi seperlunya dan menjaga agar tidak menjadi penghambat dari kegiatan rencana aksi perubahan

Tabel 2
Strategi Komunikasi

Setelah dilakukan komunikasi secara efektif oleh pemimpin perubahan kepada stakeholders eksternal sesuai kepentingan dan pengaruhnya maka didapatkan hasil bahwa stakeholders latens berpindah menjadi promoters.



Gambar 3.
Peta Stakeholder setelah aksi perubahan

4. Strategi pengembangan potensi diri

Proses memimpin aksi perubahan juga memiliki tujuan sebagai sarana pengembangan potensi diri pemimpin aksi perubahan dalam memimpin organisasinya. Kompetensi yang diasah pada proses implementasi aksi perubahan adalah pada ada 3 (tiga) komponen yaitu, integritas, kerjasama, serta mengelola perubahan.

Integritas adalah salah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Kualitas, sifat, atau kondisi yang menunjukkan satu kesatuan yang

utuh memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan otoritas, kewibawaan, dan kejujuran, demikianlah integritas. Integritas ini menjadi lebih kuat ketika seorang pemimpin konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan (menjalankan ucapannya) dan berkomitmen untuk itu.

Sedangkan jejaring kerja didefinisikan sebagai suatu set hubungan yang kuat maupun lemah antar para pihak. Jika dikaitkan dengan tugas dan tantangan kepemimpinan administrator, dapat dilihat jelas bahwa untuk dapat memastikan kinerja organisasi menjadi lebih baik tentu dapat dicapai melalui pemanfaatan modal hubungan ini. Membangun dan mengelola jejaring kerja ini pada dasarnya adalah membangun dan mengelola modal sosial untuk mencapai suatu tujuan. Jejaring kerja ini merupakan sistem pendukung yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan pribadi maupun pencapaian tujuan organisasi.

Perubahan mengandung makna beralihnya keadaan sebelumnya menjadi keadaan setelahnya. Perubahan dalam organisasi merupakan isu penting dalam suatu organisasi, perubahan dapat memberikan kesempatan bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja dari yang sebelumnya. Disinilah peran pemimpin transformasional untuk melakukan aksi perubahan bagi organisasinya. Untuk itulah diperlukan pengenalan akan potensi diri kita dan selanjutnya dilakukan strategi pengembangan potensi diri melalui berbagai macam cara yang sesuai dengan kebutuhan diri kita masing-masing.

Penilaian kompetensi diri secara mandiri bisa menjadi acuan bagi pemimpin aksi perubahan menilai kemampuan diri dan strategi meningkatkannya. Akan tetapi untuk mendapatkan gambaran kekurangan dalam diri kita perlu penilaian dari pihak lain dalam hal ini mentor. Dari kedua penilaian tersebut diperoleh gap yang harus dicari strategi peningkatan potensinya.

2	Mengelola perubahan	Inisiatif	<ul style="list-style-type: none"> - Mengasah secara mandiri kepekaan terhadap lingkungan kerja dengan menjadi pendengar yang baik serta memperbanyak referensi pemecahan masalah salah satunya dari pengalaman mentor untuk selanjutnya melakukan improvisasi solusi - Diberikan tantangan penugasan oleh mentor untuk menangani proyek perencanaan kota yang mana membutuhkan kreatifitas solusi atas permasalahan yang sangat kompleks 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan rapat rutin dan membentuk grup dengan pemilik menara dalam rangka membentuk jejaring kerja dan menjalin komunikasi untuk memudahkan koordinasi dan pemecahan permasalahan di lapangan. - Diberikan tantangan menangani hal baru yaitu pendataan menara telekomunikasi atas data yang tidak tertata sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk grup WA menara telekomunikasi Ngawi - Melakukan perencanaan rapat rutin konsolidasi untuk evaluasi data menara telekomunikasi - Mampu melakukan pendataan dan menemukan menara yang sebelumnya tidak terdata melalui pemetaan online.
---	---------------------	-----------	---	---	---

*Tabel 3.
Strategi Pengembangan Potensi Diri*

B. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

1. Capaian dalam Perbaikan Kinerja Organisasi

a. Deskripsi Capaian Hasil Perubahan

Aksi perubahan Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Menara telekomunikasi melalui Penyusunan Satu Data Menara dengan Pemetaan Online “My Maps” di Kabupaten Ngawi dengan tujuan jangka pendek mewujudkan SK Bupati Satu Data Menara Telekomunikasi dilaksanakan melalui 7 (tujuh) tahapan kegiatan yang terangkum dalam milestones jangka pendek selama 2 bulan. Adapun pelaksanaan dan capaian tahapan masing-masing kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

1) Persiapan pelaksanaan implementasi aksi perubahan

a) Konsultasi dengan mentor

Sebagai langkah awal aksi perubahan, pemimpin aksi perubahan melakukan konsultasi dengan mentor yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ngawi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 di Ruang Kerja Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ngawi. Mentor memberikan arahan agar setiap tahapan segera dilakukan secara cermat dengan segala bukti administrasi yang mendukung jalannya aksi perubahan. Mentor memberikan masukan untuk merinci setiap tahapan kegiatan beserta pihak yang mendukung aksi tersebut sekaligus output yang akan dihasilkan pada setiap akhir kegiatan. Semua itu dengan tujuan agar tidak ada tahapan atau output yang terlewat tidak dilakukan atau diadakan. Kuncinya adalah disiplin waktu, membagi waktu antara melaksanakan aksi perubahan dan mengerjakan pekerjaan rutin di Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi.



*Foto 1.
Konsultasi dengan mentor*

b) Koordinasi dengan internal

Koordinasi internal baru dapat dilaksanakan pada tanggal 13 September 2022 jam 09.00 WIB, dihadiri oleh 11 orang staf bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi di ruang studio Dinas PUPR Kabupaten Ngawi karena terdapat beberapa kendala yaitu kesibukan pekerjaan di Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi dan juga karena Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi sedang mengadakan acara Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi sejak tanggal 5-9 September 2022. Semua staf menjadi panitia acara bimbingan teknis tersebut. Resiko ini telah dimitigasi dengan upaya menggabungkan kegiatan koordinasi internal dengan kegiatan pembentukan tim efektif sehingga terjadi pemampatan kegiatan dan menghemat waktu. Undangan dalam format digital dikirim melalui WA grup Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi.

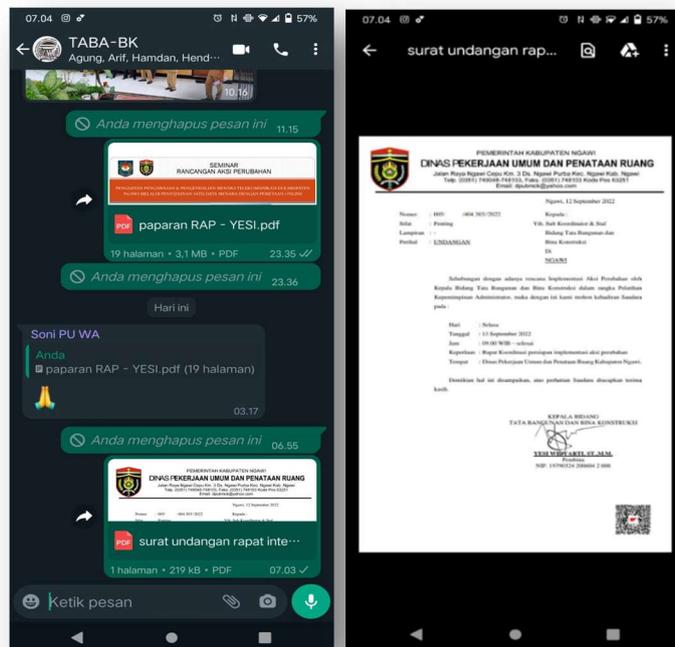


Foto 2.
Undangan rapat internal

Dalam kesempatan ini Kepala Bidang sebagai pemimpin aksi perubahan menyampaikan rencana aksi perubahan yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja bidang terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Pemimpin aksi perubahan memaparkan rencana aksi perubahan dan berusaha mengajak semua staf untuk mendukung aksi perubahan ini, memotivasi staf untuk mengajak melakukan perubahan demi meningkatnya kinerja organisasi.



*Foto 3.
Rapat internal*

Rapat internal dihadiri oleh 11 orang staf Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, sesuai daftar hadir berikut.

	Submission Date	NIP	NAMA LENGKAP	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	ADD
1	Sep 13, 2022	19860524201001001	Hendi triaji cipto	Dinas pu dan penataan rua...		
2	Sep 13, 2022	19781007201001001	JUMIRAN	DINAS PEKERJAAN UMU...		
3	Sep 13, 2022	19770224200801009	YOYOK HARIANTO	DINAS PUPR		
4	Sep 13, 2022	19860924201903006	AGUNG NUGROHO	DINAS PEKERJAAN UMU...		
5	Sep 13, 2022	19720724200501005	SONI WARSONO	DINAS PUPR KABUPATEN...		
6	Sep 13, 2022	198308262003012004	HAMDAN	DINAS PUPR		
7	Sep 13, 2022	19760723200901003	MAHFUD RUCITO	DINAS PUPR KAB NGAWI		
8	Sep 13, 2022	19940218201903009	DWI MIDE FEBRIYAN	DINAS PUPR KAB NGAWI		
9	Sep 13, 2022	1976080120101020	ASTUTI PATMARINI	DINAS PEKERJAAN UMU...		
10	Sep 13, 2022	1981091420100110	ARIF AFANDI	DUPR KAB NGAWI		
11	Sep 13, 2022	19790324	YESI WIDIARTI	tata bangunan dan bina ko...		

*Foto 4.
Rekap daftar hadir rapat internal*

Untuk menyatakan dukungan dari semua staf disusunlah Form Pernyataan Dukungan melalui JotForm dengan link yang diisi secara digital oleh semua staf seperti berikut ini.

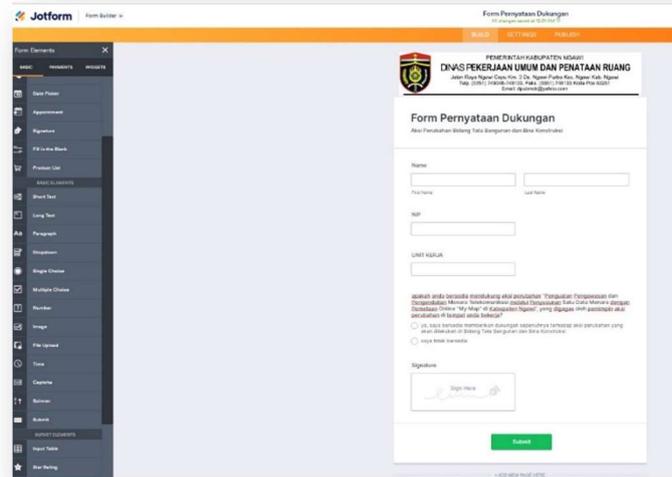


Foto 5.
Form Pernyataan Dukungan internal

Semua staf setuju dan bersedia mendukung aksi perubahan yang akan dilakukan dengan kesediaannya untuk bergabung menjadi tim efektif aksi perubahan. Rekap data pernyataan dukungan dan kesanggupan untuk membantu aksi perubahan ditunjukkan dalam tabel berikut yang diunduh dari Jotform.

No	Tgl	Nama	NP	UNIT KERJA	Apakah anda bersedia mendukung aksi perubahan 'Percepatan Program dan Pengendalian Miras Telekomunikasi melalui Peningkatan Sdk, Data Miras dengan Pemenuhan Odnw 100 Mgr' di Kabupaten K...	Signature
1	Sep 15, 2022	Herdi Praji	19802020101001	Dinas pu dan pemukiman ra...	Ya, saya bersedia memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi perubaha...	
2	Sep 15, 2022	SUTRI	19804020010001	DINAS PUPR KAS NGARAI	Ya, saya bersedia memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi perubaha...	
3	Sep 15, 2022	Nopi Marlito	197121401001008	DINAS PUPR	Ya, saya bersedia memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi perubaha...	
4	Sep 15, 2022	ARIF ARIANS	19801902010002	DUPR KABUPATEN NGA...	Ya, saya bersedia memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi perubaha...	
5	Sep 15, 2022	AZIZING NUSRANO	198016020010004	DINAS PEKERJAAN UMUM...	Ya, saya bersedia memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi perubaha...	
6	Sep 15, 2022	Adul Permali	19701002100005	Dinas Pekerjaan Umum da...	Ya, saya bersedia memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi perubaha...	
7	Sep 15, 2022	JUMARA JUMARA	19701002010001	DINAS PEKERJAAN UMUM...	Ya, saya bersedia memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi perubaha...	
8	Sep 15, 2022	Sari Wawan		Dinas PUPR Kabupaten K...	Ya, saya bersedia memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi perubaha...	
9	Sep 15, 2022	Hendri Hvi	198018020010004	Dinas PUPR	Ya, saya bersedia memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi perubaha...	
10	Sep 15, 2022	MAN-PU RIOTI	19701202010002	DINAS PUPR KAS NGARAI	Ya, saya bersedia memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi perubaha...	
11	Sep 15, 2022	DIMAS DE FEBRIANA	198420101001003	DINAS PUPR KAS NGARAI	Ya, saya bersedia memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aksi perubaha...	

Foto 6.
Rekap Pernyataan Dukungan internal

Berikut adalah form pernyataan dukungan dari staf Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, yang menyatakan bahwa dirinya sanggup dan bersedia memberikan dukungan dan membantu sepenuhnya untuk terwujudnya aksi perubahan.

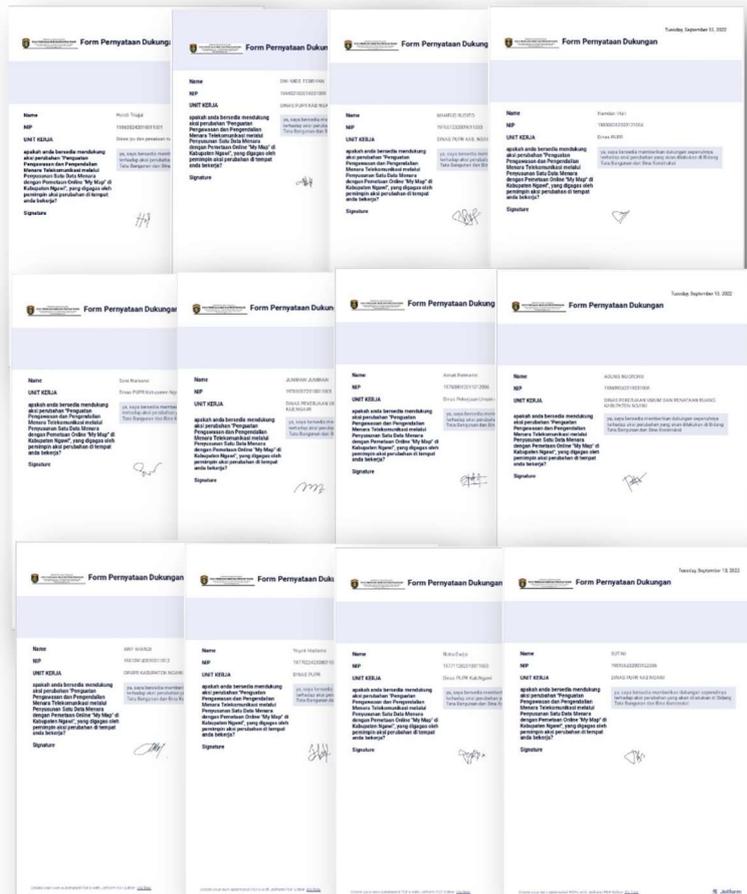


Foto 7.
Pernyataan Dukungan internal

Hasil rapat persiapan aksi perubahan dituangkan dalam notulen rapat yang ditulis oleh tim administrasi/ hukum yaitu Saudari Sutini sebagai berikut.

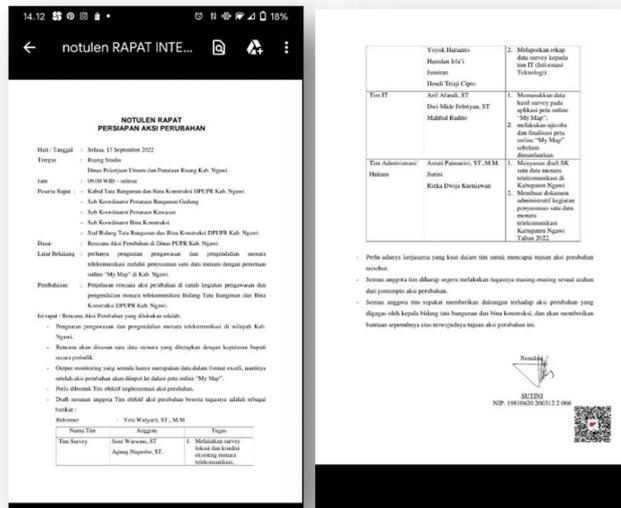


Foto 8. Notulen rapat internal

Rencana Implementasi aksi perubahan tersebut diunggah dalam web dinas PUPR dengan judul Satu Data Menara untuk Mendukung Satu Data Kabupaten Ngawi.

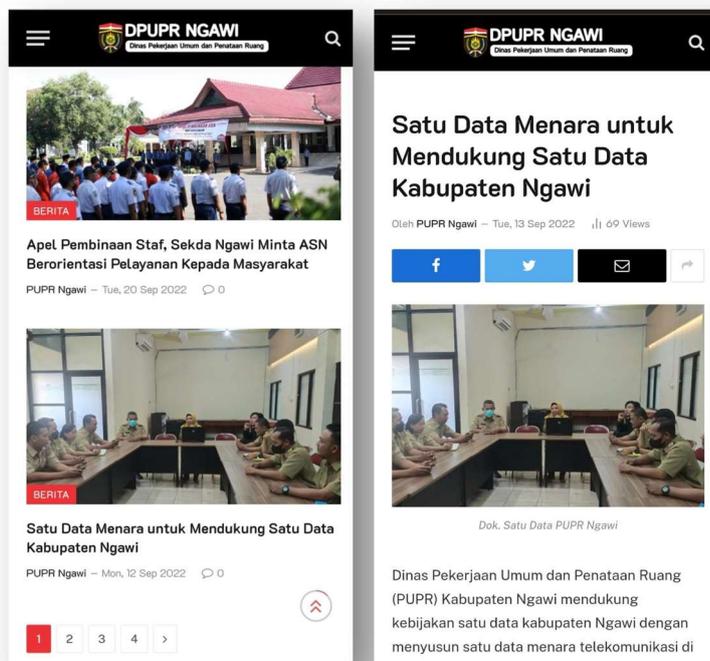


Foto 9. Aksi Perubahan diunggah dalam Website DPUPR

2) Pembentukan tim efektif

Pembentukan tim efektif dilaksanakan sekaligus pada saat rapat persiapan aksi perubahan pada Hari Selasa tanggal 13 September 2022 karena adanya kendala tertundanya rapat persiapan akibat kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Salah satu keputusan rapat adalah tersusunnya draft Tim Efektif yang tertuang dalam notulen rapat.



*Foto 10.
Rapat pembentukan tim efektif/ rapat persiapan*

a) Menyusun draft SK tim efektif

Hal ini ditindaklanjuti oleh Tim Administrasi/ Hukum dengan membuat draft Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi tentang Pembentukan Tim Efektif Penyusunan Satu Data Menara melalui Pemetaan Online “My Maps” dalam rangka Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Ngawi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022.



*Foto 11.
Tim Administrasi/ Hukum menyusun draft SK Tim Efektif*

Penyusunan draft SK dimulai dengan menginventarisasi dasar-dasar hukum yang melandasi pembentukan tim efektif penyusunan satu data menara telekomunikasi yaitu peraturan-peraturan terkait dengan kebijakan satu data dan peraturan terkait dengan menara telekomunikasi. Tim administrasi/ hukum melakukan diskusi di ruang kerja Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR pada jam kerja. Rumusan demi rumusan dituliskan berurutan untuk dijadikan materi Surat Keputusan. Kemudian rumusan-rumusan yang ada disusun sesuai aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Penyusunan draft SK Tim Efektif ini dilakukan melalui proses coaching dan mentoring sehingga tim mendapatkan pemahaman yang sama dan utuh menyeluruh selama proses penyusunan draft SK tersebut. Penyusunan dilakukan dalam satu hari kerja dan menghasilkan draft sebagai berikut.

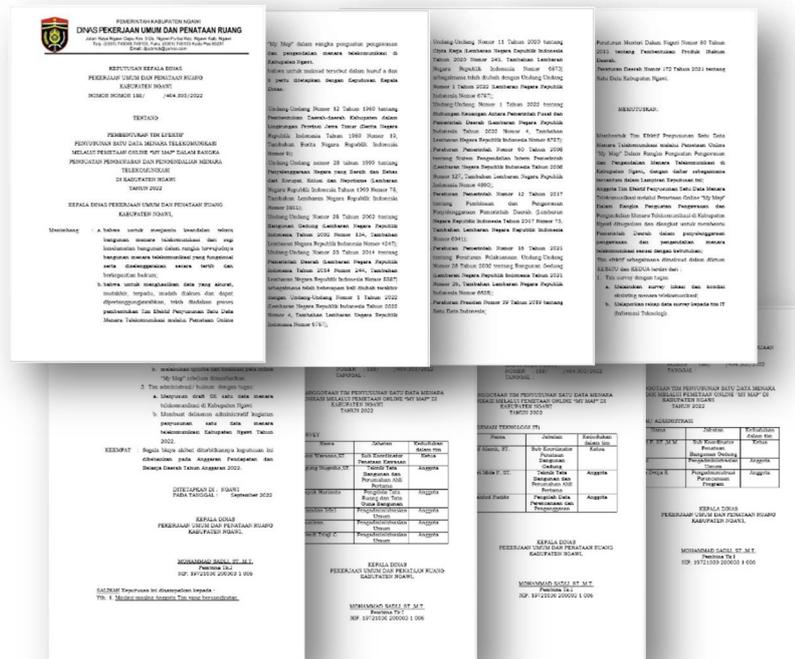


Foto 12. Draft SK Tim Efektif

Draft SK yang telah tersusun dikonsultasikan kepada pemimpin aksi perubahan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui oleh pemimpin aksi perubahan draft SK tersebut diajukan kepada Sekretaris Dinas PUPR untuk mendapatkan paraf persetujuan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022.

b) Penetapan SK tim efektif

Setelah draft disetujui oleh Sekretaris Dinas PUPR maka draft tersebut diajukan kepada Kepala Dinas PUPR untuk dilakukan penetapan. Kepala Dinas menandatangani Surat Keputusan Pembentukan Tim Efektif Penyusunan Satu Data Menara melalui Pemetaan Online “My Maps” dalam rangka Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

di Kabupaten Ngawi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022. Berikut adalah foto penandatanganan Surat Keputusan dimaksud serta foto Surat Keputusan Tim Efektif yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ngawi.



Foto 13. Penandatanganan Surat Keputusan Pembentukan Tim Efektif

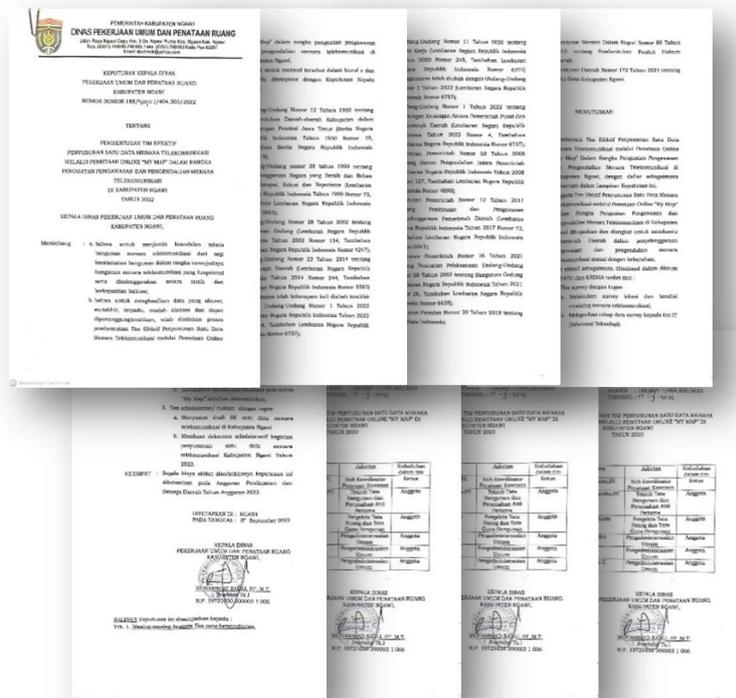


Foto 14. SK Tim Efektif yang telah ditetapkan Kepala Dinas PUPR

3) Koordinasi dengan tim efektif

Surat Keputusan Pembentukan tim Efektif telah ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada seluruh anggota tim agar seluruh anggota tim mengetahui dan memahami tugasnya masing-masing.

Langkah pertama yang digagas pemimpin aksi perubahan dan disampaikan kepada seluruh tim untuk penguatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah dengan melakukan brainstorming dalam rangka penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan pengenalan aplikasi My Maps. SOP disusun dalam format SOP administrasi serta SOP teknis yang mendukung kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai rencana akan dilakukan melalui pemetaan online dengan aplikasi My Maps. Diharapkan dengan disusunnya dua SOP ini akan memperkuat pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Ngawi yang sebelumnya dilakukan tanpa adanya standar baku terkait mekanisme atau prosedur pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi serta dokumen yang dihasilkan dari kegiatan monitoring di lapangan.

a) Penyusunan draft SOP

Langkah-langkah penyusunan SOP dilakukan menurut aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Untuk mempercepat proses aksi perubahan kegiatan pengenalan aplikasi My Map kepada Tim IT dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022. Pada saat yang bersamaan 2 tim yaitu Tim IT dan Tim Administrasi bekerja secara paralel.



*Foto 15.
Brainstorming dengan tim efektif*

Penyusunan SOP membutuhkan waktu 4 (empat) hari, mulai tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022. Berikut adalah foto Tim Administrasi menyusun SOP pada hari Senin tanggal 19 September 2022.



*Foto 16.
Tim administrasi/ hukum menyusun SOP*

Adapun langkah-langkah penyusunan SOP dijelaskan dalam uraian berikut. Langkah pertama yaitu tim menentukan rencana tindak yang akan dilakukan serta target waktu yang ditetapkan. Tim menentukan SOP apa saja yang sekiranya diperlukan oleh pemimpin aksi perubahan dalam rangka

penguatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Rencana tindak tim dengan tabel pada foto berikut.

Rencana Tindak Tim Penyusunan SOP

Urutan Kegiatan	Gajuk	Peranggungjawab	Target
1	2	3	4
Kerjasama dan pengendalian menara telekomunikasi. Pembuatan online	Standar pengemasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Foto online	Kabid Tata Bangunan dan Bina Konstruksi Rencal Tim Bangunan dan Bina Konstruksi	1 minggu 1 minggu

Ditandatangani,
Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi
DPRD Kota Ngawi



T. M. M. M.
NIP. 8190214 200804 2 008

Ditandatangani,
Tim Administrasi Penyusunan Satu Data Monitor Telekomunikasi



A. A. A.
NIP. 8190214 2011 2 008

Dipindai dengan CamScanner

Foto 17.
Rencana Tindak Tim Penyusunan SOP

Setelah tim menentukan rencana tindak, langkah selanjutnya adalah menentukan penilaian kebutuhan Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi serta menilai hubungan saling keterkaitan antara SOP dengan hal-hal lain yaitu tupoksi bidang, peraturan terkait, stakeholders serta prosedur lainnya. Penilaian tersebut ditunjukkan dengan tabel pada foto berikut.

Penilaian kebutuhan organisasi

Setoran Kerja	Bidang	Prosedur	Penilaian keterkaitan dengan				Pencapaian Pelaksanaan
			Tupoksi	Peraturan/Pedoman	Stakeholder	Prosedur	
Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Pembinaan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Sangat terkait	Sangat terkait	Sangat terkait	Sangat terkait	Sangat penting
		Pembinaan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Terkait	Terkait	Sangat terkait	Sangat terkait	Sangat penting

Ditandatangani,
Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi
DPRD Kota Ngawi



T. M. M. M.
NIP. 8190214 200804 2 008

Ditandatangani,
Tim Administrasi Penyusunan Satu Data Monitor Telekomunikasi



A. A. A.
NIP. 8190214 2011 2 008

Dipindai dengan CamScanner

Foto 18.
Penilaian kebutuhan organisasi

Tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan SOP. SOP terpilih yang akan dikembangkan dalam unit kerja organisasi Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi ada dua buah dengan masing-masing alasan yang melatarbelakanginya.

Daftar kebutuhan pengembangan SOP

Satuan Kerja	SOP yang akan dikembangkan		Alasan pengembangan
	Bidang	Prosedur	
Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	Pengadaan dan Pengiriman	Perencanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengawasan Monev Pelaksanaan	Untuk standarisasi - metode pengamatan - skema pengalokasian
	Perencanaan	Pengalaman Peta Online	Untuk standarisasi - metode pengalokasian data - pengalokasian data

Ditujukan,
Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi
DIPROK.06.10001



YUS WIDYANINGRAT, ST, M.M.
NIP. 19700224 200001 2 008

Ditujukan,
Tata Administrasi
Perencanaan Satu Data Monev
Tetrasembilan
Gedung



ASTUTI RAHMADANI, ST.
NIP. 19740809 2011 2 006

Foto 19.
Daftar kebutuhan pengembangan SOP

Pengembangan SOP administrasi pemerintahan pada dasarnya meliputi lima tahapan proses kegiatan:

- Pengumpulan Informasi dan Identifikasi Alternatif

Teknik pengumpulan informasi yang digunakan pada proses penyusunan SOP kali ini adalah teknik *brainstorming* dan teknik telaahan dokumen lainnya. Digunakan teknik *brainstorming* karena dalam unit kerja organisasi sebelumnya belum pernah ada SOP dimaksud sehingga perlu dilakukan teknik curah pendapat (*brainstorming*) untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Telaahan dokumen dilakukan untuk memperoleh informasi sekunder dari dokumen-dokumen pemerintah berkaitan dengan peraturan perundangan-perundang yang terkait dengan prosedur yang akan distandarkan. Untuk mempermudah melakukan Pengumpulan Informasi dan Identifikasi Alternatif dapat digunakan tabel sebagai berikut:

Identifikasi SOP

Sifat/Kejadian	Subsistem	Alat/Bahan	Prosedur/Kelembagaan	Waktu	Output
1. Pengawasan dan pengendalian	1.1. Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Mengawasi proses dimulainya kegiatan monitoring menara apabila terdapat laporan monitoring	<ul style="list-style-type: none"> Tek. Kontrol Manajemen Manajemen Teknik Kelembagaan menara 	3 (tiga) minggu pertama	Laporan monitoring menara telekomunikasi
2. Penataan	2.1. Fungsi/kegiatan Para Dinas	Mengawasi proses pemenuhan data dan status para dinas yang dapat memengaruhi data status yang digunakan monitoring menara telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Kelembagaan Kelembagaan Layanan Kelembagaan 	3 (tiga) minggu per hari	Data status menara

Ditandatangani,
Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi
DPRK Kab. Ngawi



YUSMANUSSELLI, ST, M.M.
NIP. 29795124 200404 2 008

Dibuat,
Tim Administrasi
Pengawasan Para Dinas Menara Telekomunikasi
Ngawi



ASTUTI KURNIAWATI, ST.
NIP. 19760801 2011 2 006

Foto 20.
Identifikasi SOP

Selain menggunakan cara identifikasi di atas, sebagai alternatif cara untuk mengidentifikasi kebutuhan SOP dapat dipergunakan cara identifikasi judul-judul SOP dengan melakukan analisis tugas dan fungsi yang dimiliki Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi sesuai dengan peraturan pembentukan organisasi. Dalam Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, salah satu tugas Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi adalah menjalankan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menjadi dasar identifikasi kebutuhan SOP nantinya.

Identifikasi SOP berdasarkan tugas dan fungsi

Tugas	Fungsi	Uraian Tugas	Kegiatan	Substansi	Jenis Kegiatan	Judul SOP
Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	Fungsional	Melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian menara telekomunikasi	Monitoring	Laporan monitoring	Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	SOP Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
Penataan	Administrasi				Penataan	SOP Fungsi/kegiatan Para Dinas

Ditandatangani,
Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi
DPRK Kab. Ngawi



YUSMANUSSELLI, ST, M.M.
NIP. 29795124 200404 2 008

Dibuat,
Tim Administrasi
Pengawasan Para Dinas Menara Telekomunikasi
Ngawi



ASTUTI KURNIAWATI, ST.
NIP. 19760801 2011 2 006

Foto 21.
Identifikasi SOP berdasar tugas dan fungsi

- Analisis dan Pemilihan Alternatif

Pemilihan alternatif prosedur yang akan distandarkan mengacu pada prinsip dasar SOP yaitu: kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan, keterukuran, dinamis, berorientasi pada pengguna, adanya kepatuhan dan kepastian hukum.

- Penulisan SOP

Ketika semua instrument telah siap, maka mulailah kegiatan penyusunan SOP. Tipe SOP yang disusun adalah SOP administrasi untuk SOP Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan SOP teknis untuk SOP Pengelolaan Peta Online “My Maps”. Sedangkan format yang sesuai untuk kedua SOP tersebut adalah SOP dalam format *flowchart* yang mana dalam prosedurnya memungkinkan adanya pilihan-pilihan tindakan atau prosedur. Draft SOP hasil dari kerja tim administrasi/ hukum ditunjukkan dalam foto berikut.

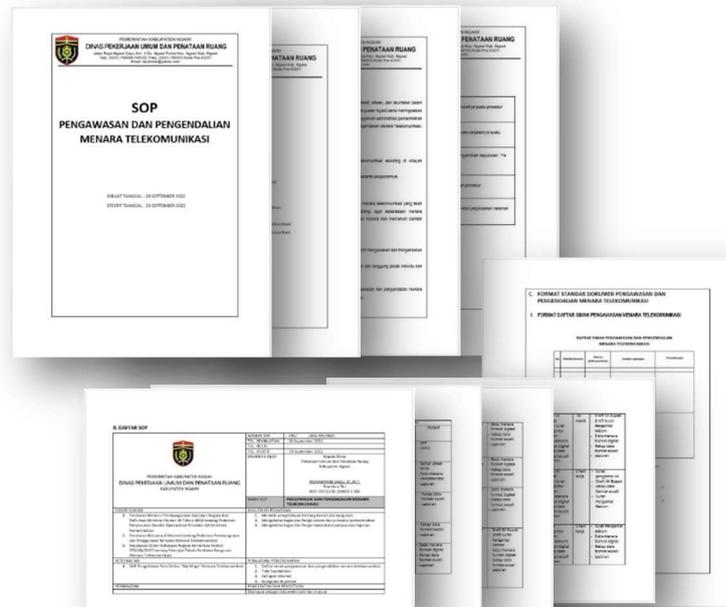
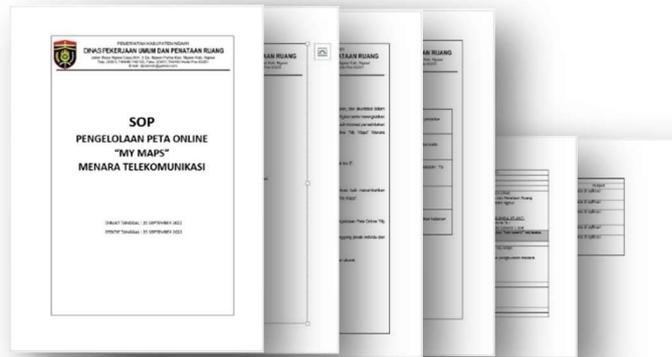


Foto 22.

Draft SOP Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi



*Foto 23.
Draft SOP Pengelolaan Peta Online "My Map"*

Tujuan digunakannya SOP adalah agar kegiatan monitoring di lapangan memiliki standar baku terkait dengan format-format dokumen, metode, dan kelengkapannya. Adapun format yang distandarkan adalah:

- format untuk daftar simak pemeriksaan kondisi bangunan menara telekomunikasi;
- format rekap data menara telekomunikasi;
- format laporan hasil kegiatan;
- format surat rekomendasi hasil monitoring;

Berikut adalah foto-foto standar dokumen yang ditetapkan dan menjadi satu dokumen dengan SOP yang akan disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi. Dokumen-dokumen standar ini nantinya akan menjadi pedoman bagi tim survey menara telekomunikasi dalam menyampaikan laporan hasil monitoring menara telekomunikasi:



Foto 29.
Uji Coba penggunaan daftar simak pengawasan menara

c) Penetapan SOP.

Pada tanggal 22 September 2022 SOP Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi serta SOP Pengelolaan Peta Online “My Maps” disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk segera digunakan sebagai pedoman ketika melakukan kegiatan monitoring di lapangan. Semua prosedur dan format-format dokumen harus menggunakan pedoman SOP yang berlaku efektif pada tanggal 23 September 2022.



Foto 30.
Penandatanganan SOP oleh Kepala Dinas PUPR



Foto 31.
SOP telah disahkan oleh Kepala Dinas PUPR

d) Mengenalkan pemetaan online “My Maps”

Pada tanggal 16 September 2022 Tim IT dan Tim Survey dikumpulkan oleh pemimpin aksi perubahan dalam rangka pengenalan aplikasi peta online “My Maps”. Hal ini dilakukan sebagai persiapan tim sebelum melakukan input data menara telekomunikasi ke dalam peta. Berikut adalah foto ketika tim melakukan sesi pembelajaran peta online bersama pemimpin aksi perubahan.



Foto 32.
Tim IT dan Tim Survey Belajar Aplikasi My Maps

e) Merekap data menara telekomunikasi

Sebagai materi pemetaan menara telekomunikasi, mulai tanggal 19 September 2022 Tim Survey mengumpulkan rekap data yang diperoleh saat melakukan monitoring di lapangan. Data tersebut tersusun dalam format excell. Berikut adalah foto Tim IT dan Tim Survey mengumpulkan rekap data menara telekomunikasi pada tanggal 19 September 2022



*Foto 33.
Tim Survey Merekap Data Menara Telekomunikasi*

Dalam Berita Acara Serah Terima Urusan Menara Telekomunikasi pada awal Januari 2022 telah dirinci data menara yang diserahkan dari Dinas Kominfo kepada Dinas PUPR sejumlah 181 menara dengan rincian terlampir. Kemudian Tim survey melakukan overlay antara data yang dimiliki DPMPSTP, Badan Keuangan, Dinas Kominfo, dan Dinas PUPR dari hasil monitoring terupdate.



Foto 34.
Overlay Data Menara Telekomunikasi

Setelah dilakukan overlay antara data yang dimiliki, didapatkan selisih 68 menara baru ditemukan di lapangan. Dari 68 menara terdapat 29 menara yang tidak diketahui identitas kepemilikannya yang daftarnya ditunjukkan dalam foto berikut.

DATA MENARA TELEKOMUNIKASI YANG BELUM TERIDENTIFIKASI

NO	PROVIDER	ALAMAT	KETINGGIAN	X	Y
1	?	Dsn. Pula, RT. 03 RW. 02, Ds. Maetingan, Kec. Maetingan, Kab. Niasel	70	-7.865243	111.14625
2	?	Dsn. Ngrusang, Kec. Maetingan, Kab. Niasel		-7.86889	111.16667
3	?	Dsn. Nrota, RT. 03 RW. 06, Ds. Karangagung, Kec. Pitu, Kab. Niasel		-7.87779	111.18607
4	?	Ds. Keroa RT.02 RW.03, Ds. Pasing, Kec. Padas, Kab. Niasel		-7.81559	111.52688
5	?	Dsn. Padas, Ds. Padas, Kec. Padas, Kab. Niasel		-7.81361	111.52761
6	?	Jl. Raya Pangkur, RT. 03 RW. 05, Ds. Pangkur, Kec. Pangkur, Kab. Niasel	72	-7.88904	111.54074
7	?	Dsn. Magozana IV RT. 3 RW. 4, Ds. Magozana, Kec. Kawabunan, Kab. Niasel		-7.83326	111.54746
8	?	RT. 03 RW. 03, Jembatan DSN Nivawakung 1, Ds. Nivawakung, Kec. Kawabunan, Kab. Niasel		-7.8364	111.52466
9	?	Jl. Raya Kenitan, Ds. Kenitan, Kec. Geneng, Kab. Niasel	72	-7.85629	111.42925
10	?	Dsn. Keraa Wetan II, RT. 03 RW. 02, Ds. Keraa Wetan, Kec. Geneng, Kab. Niasel	72	-7.83107	111.42917
11	?	Dsn. Dorepik, Ds. Kampunan, Kec. Geneng, Kab. Niasel		-7.88976	111.45667
12	?	DSN. TAMBAKROMO, RT. 03 RW. 03, Ds. TAMBAKROMO, Kec. Geneng, Kab. Niasel		-7.82091	111.42407
13	?	Dsn. Mungupung, Ds. Widofoara, Kec. Givika, Kab. Niasel		-7.8457	111.36213
14	?	Pucanganom (Belakang DNM Kendal), Ds. Kendal, Kec. Kendal, Kab. Niasel		-7.86324	111.28815
15	?	Dsn. Getan, Ds. Sotopis, Kec. Kendal, Kab. Niasel		-7.85021	111.28938
16	?	DSN. GENGONGI, RT. 02 RW. 03, Ds. GENGONGI, KEC. JOGOROGO, KAB. NGAWA	65	-7.81179	111.29813
17	?	Dsn. Ngetrep, RT. 03 RW. 05, Ds. Hangmuluh, Kec. Ngaraba, Kab. Niasel	42	-7.84380	111.20115
18	?	Dsn. Bendo, RT. 03 RW. 03, Ds. Karama, Kec. Sine, Kab. Niasel		-7.87027	111.1813
19	?	Dsn. Bualatara, RT. 09 RW. 05, Ds. Bualatara, Kec. Widofoara, Kab. Niasel		-7.80951	111.18808
20	?	Dsn. Ngasonon, RT. 05 RW. 05, Ds. Karangbana, Kec. Widofoara, Kab. Niasel		-7.87128	111.25495
21	?	Dsn. Widofoara, RT. 03 RW. 04, Ds. Karangbana, Kec. Widofoara, Kab. Niasel		-7.87601	111.25418
22	?	Dsn. Wana, RT. 05 RW. 03, Ds. Sidolaja, Kec. Widofoara, Kab. Niasel		-7.85011	111.26134
23	?	Dsn. Alomode, RT. 04 RW. 08, Tumpang, Ds. Bangunjo Kuda, Kec. Keuhunggal, Kab. Niasel		-7.89003	111.23601
24	?	RT. 02 RW. 03, Ds. Jengra, Kec. Keuhunggal, Kab. Niasel		-7.89467	111.38852
25	?	Dsn. Tambakoro, RT. 03 RW. 03, Ds. Pelangur, Kec. Keuhunggal, Kab. Niasel		-7.89282	111.2804
26	?	Dsn. Silego, RT. 05 RW. 06, Ds. Nipa, Kec. Paitan, Kab. Niasel			
27	?	RT. 03 RW. 04, Ds. Baniyuro, Kec. Niasel, Kab. Niasel		-7.86848	111.48608
28	?	Jl. PB Sudirman, Gg. Bratang, RT. 03 RW. 02, Kel. Magozana, Kec. Niasel, Kab. Niasel	62	-7.80950	111.43456
29	?	Jl. Imam Bonjol, Gg. Niasel, RT. 03 RW. 04, Kel. Magozana, Kec. Niasel, Kab. Niasel		-7.80117	111.44295
30	?	Jl. Letjend Sartono, Dsn. Padas, RT. 03 RW. 14, Ds. Jurnajo, Kec. Niasel, Kab. Niasel	30	-7.81260	111.43865

Foto 35.
Data Menara Telekomunikasi Belum Teridentifikasi

Sejumlah 29 menara tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan

stakeholder terkait yaitu asosiasi dan provider menara telekomunikasi untuk dilakukan identifikasi kepemilikan menara.

Pada tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 tim survey dan tim IT bekerjasama menyusun data menara telekomunikasi dari format awal menjadi format baku yang telah disahkan pada tanggal 23 September 2022 untuk dimasukkan ke dalam peta online My Maps. Data awal menara telekomunikasi adalah data sesuai format yang didapatkan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Ngawi seperti foto di bawah ini.

REKAP DATA MENARA TAHUN 2021 (Jumlah Hasil Rekam sebanyak 181 menara)				
NO	PROVIDER	ALAMAT	KETINGGIAN	KETERANGAN
1	TELKOMSEL	1. Dsn Sembung RT/RW 01/02, Ds Sembung, Kec Karang Jati, Kab Ngawi	72 m	
2	(33 menara)	2. Dsn Kempa Hutan RT/RW 00/02, Ds Kempa Hutan, Kec Geneng, Kab Ngawi	72 m	
3		3. Dsn Njatep RT/RW 03/05, Ds Hargo Mulyo, Kec Ngarabito, Kab Ngawi	47 m	
4		4. Dsn Bukit Timan RT/RW 02/11, Ds Tambak Boyo, Kec Marlingan, Kab Ngawi	62 m	
5		5. Dsn Pulo RT/RW 01/02, Ds Ngarabito, Kec Ngarabito, Kab Ngawi	72 m	
6		6. J Raya Suka RT/RW 02/01, Ds Karonan, Kec Suka, Kab Ngawi	72 m	
7		7. Dsn Pulorejo RT/RW 02/09, Ds Kedung Galur, Kec Kedung Galur, Kab Ngawi	62 m	
8		8. Dsn Duronan RT/RW 01/01, Ds Kedung Galur, Kec Kedung Galur, Kab Ngawi	72 m	
9		9. J Merapi No. 31, Dsn Kagen RT/RW 02/01, Ds Samberejo, Kec Marlingan, Kab Ngawi	72 m	
10		10. Dsn Sidorejo RT/RW 00/04, Ds Sidorejo, Kec Widodaren, Kab Ngawi	72 m	
11		11. Ds Widodaren Kidul RT/RW 06/02, Kel Candangan, Kec Widodaren, Ngawi, Jawa Timur	72 m	
12		12. J Masjid, Dsn Baganan RT/RW 01/05, Ds Jagono, Kec Jagono, Kab Ngawi	62 m	
13		13. J Raya Kendal RT/RW 01/01, Ds Putang Anom, Kec Kendal, Kab Ngawi	72 m	
14		14. Dsn Tembung RT/RW 00/02, Ds Pulo, Kec Pulo, Kab Ngawi	72 m	
15		15. J Raya Paton RT/RW 04, Ds Legowo, Kec Paton, Kab Ngawi	72 m	
16		16. J Raya Suka Ds Bangun Rong, Kec Kedung Galur, Kab Ngawi	72 m	
17		17. Dsn Pacang, Ds Pacang RT/RW 00/01, Kec Pacang, Kab Ngawi	72 m	
18		18. J Raya Maja No 1, Kel Kotonaga, Kec Ngawi, Kab Ngawi	72 m	
19		19. J Yos Sudarso RT/RW 02/02, Ds Tejas, Kec Geneng, Kab Ngawi	62 m	
20		20. J Raya Kuntan, Kec Geneng	72 m	
21		21. J A. Yani RT/RW 00/02, Ds Nila, Kec Geneng, Kab Ngawi	62 m	
22		22. J Raya Kembang RT/RW 01/01, Ds Kembang, Kec Kiangsutan, Kab Ngawi	72 m	
23		23. Dsn Cappel RT/RW 00/04, Ds Ngancar, Kec Pitu, Kab Ngawi	72 m	
24		24. Dsn Sambu Reboeng RT/RW 00/02, Ds Kiba, Kec Geneng, Kab Ngawi	72 m	
25		25. Dsn Karang RT/RW 00/02, Ds Ngali, Kec Pawan, Kab Ngawi	72 m	
26		26. Dsn Brings RT/RW 00/01, Ds Brings, Kec Brings, Kab Ngawi	62 m	

Foto 36.

Rekap Data Menara Telekomunikasi Format Diskominfo

Data hanya terdiri dari nama provider, alamat site menara telekomunikasi serta ketinggian menara telekomunikasi. Data yang tersedia kurang lengkap dan sulit dianalisa karena pembaca data tidak mendapatkan gambaran sebaran maupun ketepatan data (tidak terjadi data ganda/ pun terhapusnya data).

Kemudian tim survey mengubah format data sesuai format yang dibakukan dalam SOP Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terdiri dari kolom nama provider, alamat site yang terpisah antara

dusun, desa, kecamatan dan kabupaten, kemudian ketinggian menara, titik koordinat menara, kondisi menara, rekomendasi dari tim pengawasan dan pengendalian menara serta kolom foto menara telekomunikasi per titik. Diharapkan format baku ini memudahkan tim IT untuk memasukkan data ke dalam peta online My Maps. Selain mudah dalam proses input data diharapkan nantinya data akan mudah dibaca serta dianalisa oleh pembaca. Data tersebut dipisahkan menurut kepemilikan menara telekomunikasi untuk memudahkan proses penghitungan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Berikut adalah format yang telah dibakukan.

NO	PROVIDER	DUSUN/RT/RW	DESA	KEC/KAB	KETINGGIAN MENARA	X	Y	KONDISI MENARA	REKOMENDASI	FOTO
1	TBC	Dukuh Blandongan, Des. Ngelo, RT. 01 RW. 01	Des. Jatinulio	Kec. Mantingan, Kab. Ngawi	52	12,36367	111,15425	terawat	jika kondisi menara tetap baik	
5	TDC	Des. Talitong, RT. 01 RW. 01	Des. Karangmaji	Kec. Karangmaji, Kab. Ngawi	52	12,36793	111,17024	gantung gantung rusak	perbaiki gantung gantung	

Foto 37.

Rekap Data Menara Telekomunikasi sesuai format baku DPUPR

Data menara telekomunikasi yang telah terekap dalam format baku lantas dicek ulang oleh Tim Survey untuk mencocokkan jumlah total menara dan meyakinkan bahwa semua menara telah terekap dalam database menara telekomunikasi. Total data menara dari hasil survey Dinas PUPR adalah 247 menara yang didalamnya terdapat 29 menara yang belum teridentifikasi kepemilikannya.

4) Koordinasi dengan stakeholder eksternal

Stakeholder eksternal merupakan pihak yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan aksi perubahan. Stakeholder yang berperan dalam aksi perubahan ini adalah provider menara telekomunikasi, asosiasi provider menara telekomunikasi, DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Badan Keuangan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Badan Pusat Statistik, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

a) Persiapan pelaksanaan sinkronisasi data menara telekomunikasi

Langkah awal penyusunan satu data menara adalah melakukan sinkronisasi data menara telekomunikasi hasil overlay 4 data dari sumber yang berbeda. Stakeholder terkait pada tahap sinkronisasi data menara telekomunikasi adalah asosiasi menara telekomunikasi serta para provider. Koordinasi awal dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan sinkronisasi data menara telekomunikasi yang belum teridentifikasi pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, seperti terlihat dalam foto berikut. 29 (dua puluh sembilan) buah menara inilah yang dikirimkan oleh pihak Dinas PUPR kepada asosiasi yang menaungi menara telekomunikasi di Indonesia (ATSI) untuk mendapatkan konfirmasi.

tentang Pembangunan, Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara telekomunikasi pasal 27 menyatakan bahwa apabila menara telekomunikasi dalam kurun waktu 1 tahun tidak beroperasi maka bisa dilakukan pembongkaran apabila tidak diketahui kepemilikannya, yang mana pembongkaran ini dilakukan oleh pemerintah daerah dengan anggaran yang disediakan oleh APBD.

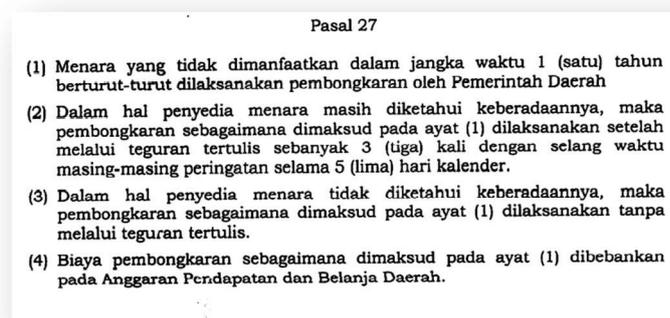


Foto 41.

Pasal 27 Perda No. 16 Tahun 2019 terkait pembongkaran menara telekomunikasi

5) Melakukan pemetaan online My Maps

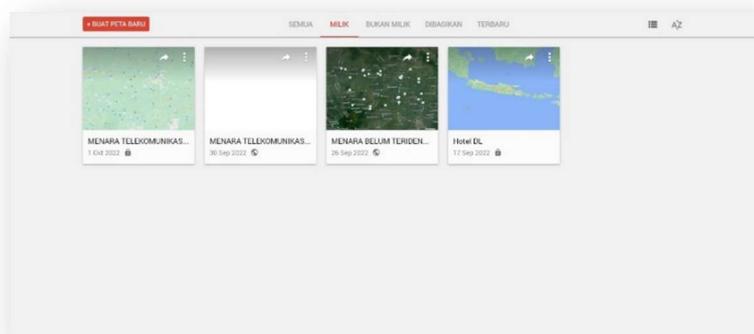
a) Input data menara telekomunikasi

Kemudian tim IT melakukan input data 229 titik menara telekomunikasi pada tanggal 29 September 2022. Titik menara telekomunikasi yang diinput adalah titik menara yang telah tekonfirmasi oleh pemiliknya dan telah disampaikan melalui WA grup menara telekomunikasi Kabupaten Ngawi. Langkah menginput data menara telekomunikasi ke dalam My Maps adalah sebagai berikut:

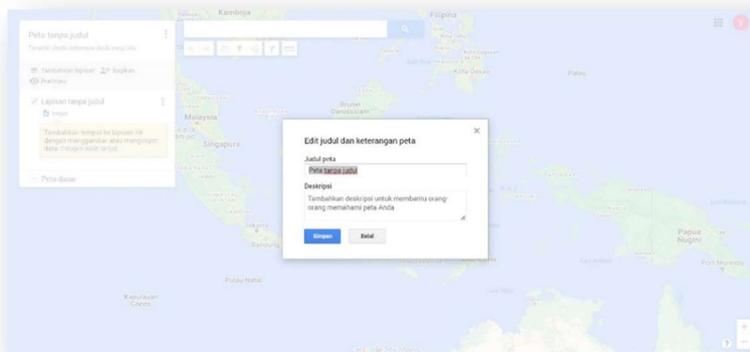
1. Buka Google My Maps di web browser dan klik tombol MULAI.



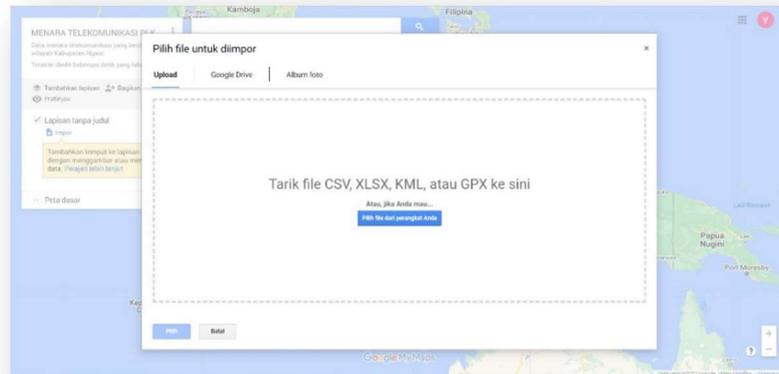
2. Klik BUAT PETA BARU untuk membuat peta menara telekomunikasi di Kabupaten Ngawi.



3. Ketikkan JUDUL dan DESKRPSI peta yang akan dibuat.

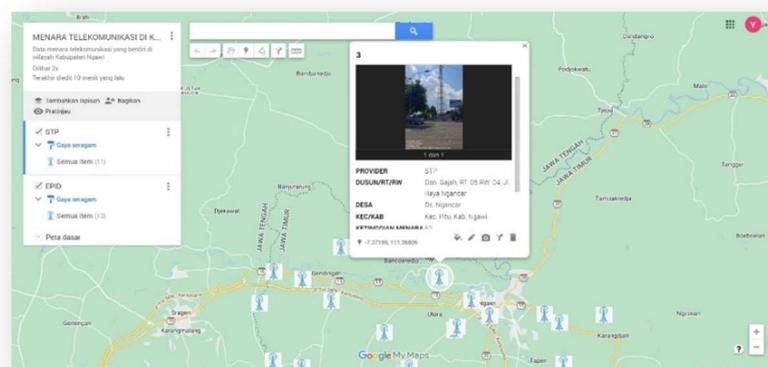


4. Klik **IMPORT** pada layer yang dipilih untuk mengambil data dari file yang tersimpan dalam format excell.



Semua data menara tiap provider akan secara bersamaan masuk ke dalam peta My Maps menjadi titik-titik menara. Ini memudahkan tim menginput data dalam waktu yang singkat dengan hasil yang tepat.

5. Data dari 1 provider telah terupload dalam My Maps menjadi titik menara sesuai jumlah menara yang ada. Data dilengkapi dengan foto-foto yang mendukung keterangan kondisi menara terkini. Untuk mengupload data dari provider lainnya klik **TAMBAHKAN LAPISAN**.



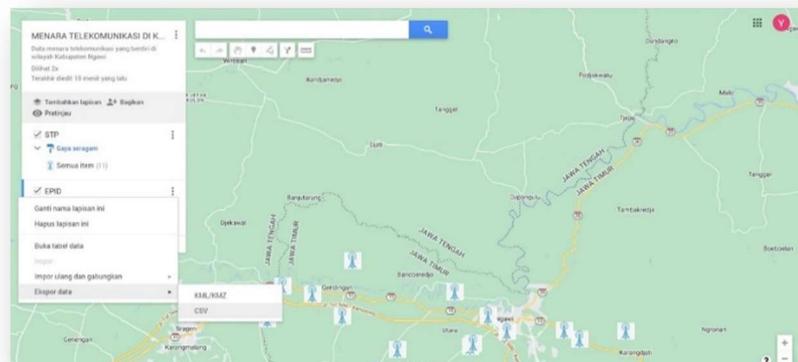
Jumlah lapisan sesuai dengan jumlah provider. Metode lapis/layer ini memudahkan kita untuk melihat titik menara milik

masing-masing provider dengan cara mengaktifkan layer yang ingin dilihat dan mematikan layer provider lainnya (klik tanda centang).

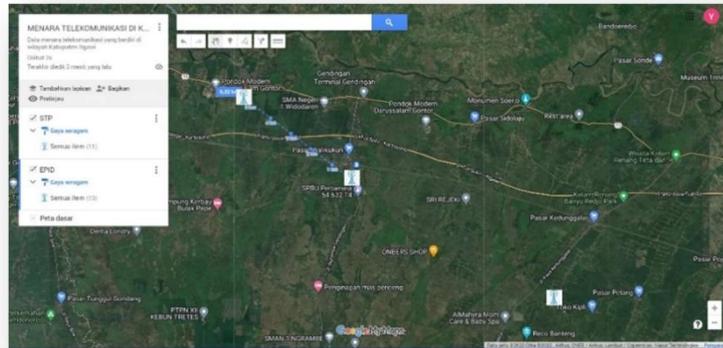
6. Data menara bisa diubah (dikurangi maupun ditambahkan) dengan cara klik TANDA TITIK TIGA kemudian klik BUKA TABEL DATA.

NO	PROVIDER	DUSUN/RT/RW	DESA	KECAB	KETINGGASAN MENARA	X	Y	KONDISI MENARA	REKOMENDASI
1	STP	Jl. Raya Mandirgen-Pakel RT 02 RW 01	Des. Mandirgen	Kec. Mandirgen, Kab. Ngawi	82	-7.36411	111.1166	terawat	jaga kondisi me
2	STP	Des. Banyu Asih Barat RT 01 RW 03	Des. Karangayur	Kec. Karangayur, Kab. Ngawi	81	-7.23172	111.23699	terawat	jaga kondisi me
3	STP	Des. Gagal RT 05 RW 04 Jl. Raya Ngancar	Des. Ngancar	Kec. Pitu, Kab. Ngawi	82	-7.31799	111.36806	pagar timur maling	perbaiki struktu
4	STP	Des. Bringsi RT 02 RW 01	Des. Bringsi	Kec. Bringsi, Kab. Ngawi	71	-7.42261	111.95777	kurang terawat	perbaiki struktu
5	STP	Jl. Lawi RT 03 RW 01	Des. Padan	Kec. Padan, Kab. Ngawi	72	-7.42263	111.82806	kurang terawat	lakukan peremab
6	STP	Des. Pangkur RT 10 RW 01	Des. Pangkur	Kec. Pangkur, Kab. Ngawi	81	-7.49807	111.93419	terawat	jaga kondisi me
7	STP	Raja Ngawi Mangutan, Des. Wironery, RT07 RW 05	Des. Suderjo	Kec. Kandat, Kab. Ngawi	71	-7.5274	111.78789	terawat	jaga kondisi me
8	STP	Des. Pula RT 01 RW 02, Jl. Sultan Agung No. 9	Des. Ngambe	Kec. Ngambe, Kab. Ngawi	71	-7.51323	111.20381	kurang terawat	lakukan peremab
9	STP	Jl. Urung Suroso RT 22 RW 01	Des. Kunikan	Kec. Suro, Kab. Ngawi	71	-7.52709	111.16414	terawat	jaga kondisi me
10	STP	Jl. Bercabang Raya, Des. Darmas RT 02 RW 01	Des. Kembanglar	Kec. Kembanglar, Kab. Ngawi	82	-7.4454	111.29427	terawat	jaga kondisi me
11	STP	Des. Selang RT 02 RW 01, Jl. Kallio	Des. Geling	Kec. Panen, Kab. Ngawi	82	-7.44187	111.38766	pagar timur maling	perbaiki struktu

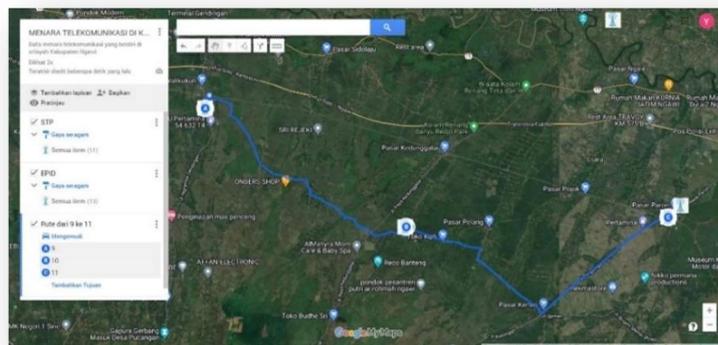
7. Data juga bisa di ekspor menjadi file dengan format csv atau kml/kmz sehingga memudahkan kita untuk merekap data menara dengan tepat dan akurat tanpa adanya kemungkinan duplikasi/ pun eliminasi data.



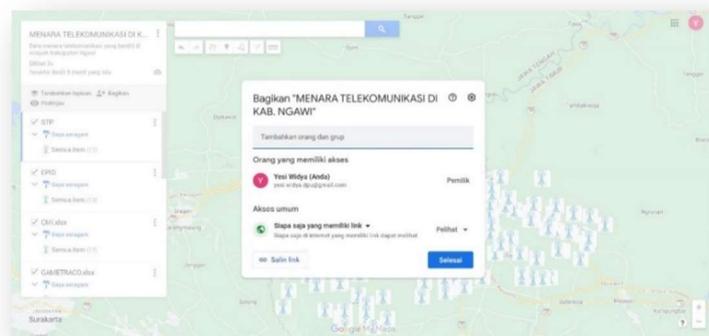
8. Adanya fitur UKUR JARAK akan memudahkan tim ketika ingin mengetahui jarak/ radius antar menara,,,,,,



9. Fitur TAMBAHKAN RUTE memudahkan tim saat menyusun rute monitoring dari satu menara ke menara lainnya dalam satu hari secara efektif.



10. Peta dapat dibagikan kepada semua orang yang memiliki link dengan cara klik BAGIKAN sesuai format yang diinginkan.



Ketika OPD lain atau pun provider mendapatkan link dari pemegang akses utama My Maps, yang bisa dilakukan adalah melihat data setiap titik menara telekomunikasi dengan mengklik icon menara yang ada untuk mendapatkan informasi terkait menara dimaksud. Bagi penerima peta terdapat fitur rute yang mana fitur tersebut bisa dimanfaatkan sebagai petunjuk untuk menuju ke lokasi menara dalam rute terbaik menurut google maps. Untuk memberikan masukan/ revisi data hanya diberikan satu akses dari pemegang kegiatan yaitu Dinas PUPR, yang mana hal ini untuk menghindari adanya informasi yang liar dan penyalahgunaan kewenangan atas data menara telekomunikasi. Apabila pihak lain akan mengubah data, pihak tersebut dapat memberikan konfirmasi melalui Dinas PUPR agar Dinas PUPR mengakses data dan mengubahnya sesuai usulan yang telah dikonfirmasi bersama kebenarannya.

b) Cek ulang data menara telekomunikasi

Kemudian Tim IT mengecek kembali kebenaran data yang terekap agar tidak terjadi kesalahan input data ke dalam peta nantinya. Berikut adalah foto tim ketika melakukan cek data.



*Foto 42.
Cek ulang data rekap menara*

c) Finalisasi pemetaan online My Maps

Sebagai langkah finalisasi dilakukan ujicoba pemanfaatan peta online pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 dalam rangka pemanfaatan My Maps sebagai alat monitoring menara nantinya. Tim mencoba beberapa fitur yang ada dalam peta online untuk menguji efektifitas penggunaan peta ketika monitoring.

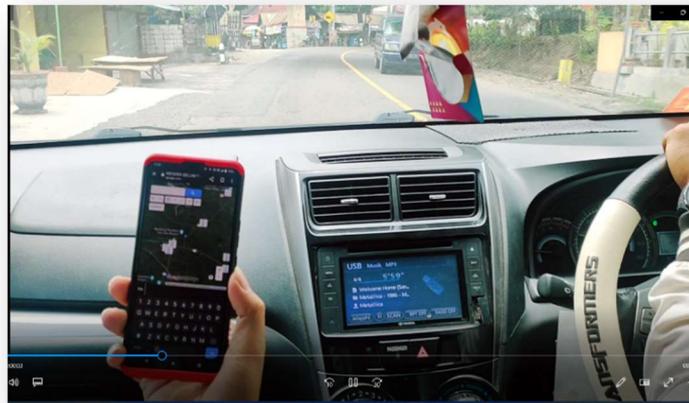


Foto 43.
Uji Coba Penggunaan My Maps untuk monitoring menara

6) Melakukan konsolidasi

a) Persiapan acara rapat konsolidasi

Pihak provider serta OPD terkait perlu diajak komunikasi sebagai aspek penyamaan persepsi dalam rangka penyusunan satu data menara telekomunikasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi perlu mengundang semua provider yang memiliki menara telekomunikasi di Kabupaten Ngawi dan OPD terkait untuk melakukan koordinasi persiapan penyusunan satu data menara telekomunikasi di Kabupaten Ngawi. Sehubungan dengan hal tersebut provider dan stakeholder terkait diundang untuk melakukan rapat koordinasi. Karena lokasi semua provider berada di luar Kota Ngawi dipilihlah pertemuan melalui *zoom meeting*. Untuk mendapatkan

link zoom Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi bersurat ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi pada tanggal 3 Oktober 2022.



Foto 44.
Surat Permohonan Link Zoom Meeting

Sebagai persiapan acara rapat, tim administrasi menyusun materi paparan pada tanggal 4 Oktober 2022. Materi paparan disusun dengan tujuan untuk memudahkan pemimpin aksi perubahan menyampaikan maksud dan arah aksi perubahan yang sedang dilakukan.

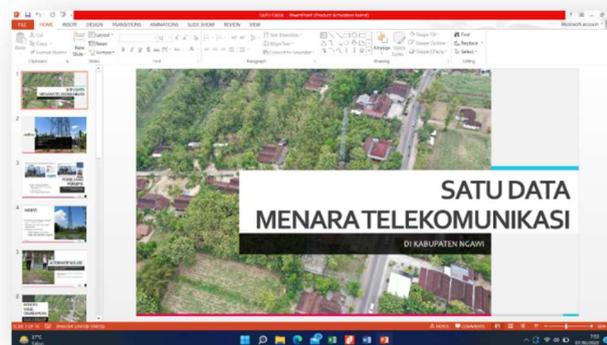


Foto 45.
Materi paparan rapat konsolidasi

Selain materi paparan terkait penyusunan satu data menara telekomunikasi di Kabupaten Ngawi, tim administrasi juga membuat daftar hadir melalui jotform yang *link*-nya nanti akan dibagikan pada saat *zoom meeting* berlangsung. Daftar hadir nantinya akan direkap dan disimpan. Beberapa informasi yang ada dalam daftar hadir akan disimpan sebagai data atau identitas personal yang bisa diajak bekerjasama dan berkoordinasi terkait menara telekomunikasi.



The image shows a digital registration form titled "DAFTAR HADIR" (Attendance List) for a meeting. The subtitle is "RAKOR PENYUSUNAN SATU DATA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KAB. NGAWI". The form contains the following fields:

- NAMA LENGKAP ***: A text input field with a "huruf besar" (uppercase) label below it.
- OPD/PERUSAHAAN ***: A text input field with a "huruf besar" (uppercase) label below it.
- NOMOR HANDPHONE ***: A text input field.
- email ***: A text input field.
- TANDA TANGAN ***: A signature area with a "Sign Here" label and a blue ink signature icon.

At the bottom of the form is a green "Submit" button.

Foto 46.
Form Daftar hadir rapat konsolidasi

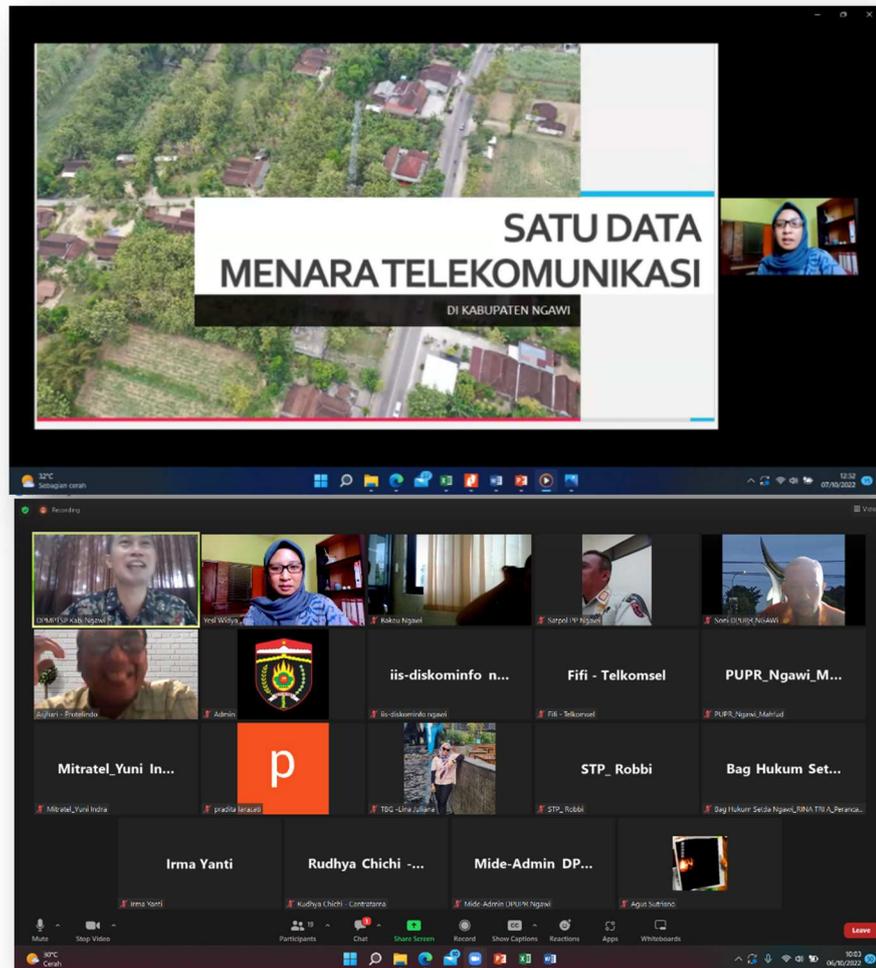
Pada tanggal 3 Oktober 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi mengirimkan balasan langsung atas surat permintaan *link zoom meeting*. *Link zoom meeting* tersebut dikirim melalui pesan singkat ke nomer telepon Kepala Bidang Tata Bangunan dan

Bina Konstruksi sebagai pemimpin aksi perubahan agar memudahkan pemimpin aksi perubahan membagikan *link* tersebut kepada semua undangan selain juga *link* tersebut disampaikan melalui undangan resmi.



Foto 47
Link Zoom Meeting dari Dinas Kominfo

Setelah *link zoom meeting* diperoleh dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi, maka dibuatlah surat undangan rapat koordinasi dengan provider dan stakeholder terkait yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi. Undangan ditujukan kepada 10 provider yang memiliki menara telekomunikasi di Kabupaten Ngawi, 1 Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), dan 6 OPD terkait. Total jumlah undangan adalah 17 orang. Berikut adalah foto surat undangan dimaksud.



*Foto 49.
Tangkapan Layar saat Zoom Meeting*

Pada sesi tanya jawab, ada beberapa tanggapan dan masukan dari peserta zoom. Tanggapan pertama diberikan oleh Bapak Lukas Kukuh Sarantyo Kepala Bidang Perijinan DPMPTSP. Beliau sangat mengapresiasi adanya pertemuan ini, yang mana sangat baik untuk membina komunikasi antara OPD pemerintah daerah Kabupaten Ngawi dengan pihak perusahaan provider menara telekomunikasi. Adanya ketidaksamaan data memang menjadi masalah tersendiri bagi DPMPTSP ketika terjadi pengaduan dari masyarakat. DPMPTSP kesulitan mencari informasi ketika ternyata menara tersebut telah berganti kepemilikannya tanpa

adanya pemberitahuan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu DPMPTSP sangat mendukung adanya kebijakan satu data menara telekomunikasi sebagai basis data semua OPD ketika membutuhkan informasi terkait menara telekomunikasi dan perlu dilakukan update data secara berkala.



Foto 50.

Kabid Perijinan DPMPTSP memberikan tanggapan dalam zoom

Tanggapan kedua dari Badan Keuangan Kabupaten Ngawi oleh Bapak Ahmad Arwan Arifiyanto Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. Beliau juga mengapresiasi forum kali ini karena Badan Keuangan mengakui tidak memiliki akses untuk memperbarui data menara telekomunikasi sehingga menyulitkan mereka saat akan mengirimkan tagihan pajak bumi dan bangunan kepada pemilik menara telekomunikasi. Melalui inovasi dari Dinas PUPR harapan beliau akan sangat membantu Badan Keuangan mencapai target Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak.



Foto 51.

Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan memberikan tanggapan dalam zoom

Tanggapan ketiga dari Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Bapak Arief Setiyono. Beliau mengharapkan satu data menara telekomunikasi Kabupaten Ngawi ini segera terwujud sebagai dasar setiap OPD dalam melakukan kegiatan dan kebijakannya. Terutama bagi Satpol PP yang tugasnya adalah sebagai penegak perda, mereka akan memiliki dasar hukum yang jelas ketika melakukan penegakan aturan di lapangan.



*Foto 52.
Kabid Penegakan Perda Satpol PP memberikan tanggapan dizoom*

Tanggapan juga diberikan oleh pihak provider sebagai perwakilan adalah dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) yang membawahi 2 perusahaan selain Protelindo juga sebagai pemilik perusahaan telekomunikasi PT. Komet Infra Nusantara (KIN). Bapak Ashari sebagai wakil dari PT. Protelindo dan PT. KIN menyampaikan bahwa satu data menara telekomunikasi ini sangat bagus untuk pemerintah daerah agar target retribusi daerah lebih terukur. PT. Protelindo dan PT. KIN siap mendukung penyusunan satu data menara telekomunikasi di Kabupaten Ngawi dan menyarankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi sebagai pintu utama untuk

melakukan validasi data kepada provider sebelum menentukan data masing-masing provider sebagai dasar penarikan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi setiap tahunnya



Foto 53.

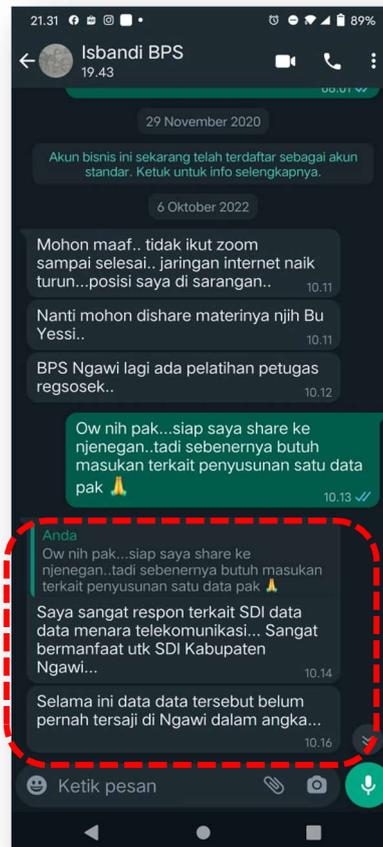
Perwakilan PT. Protelindo memberikan tanggapan dalam zoom

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menambahkan penekanan kepada semua provider yang hadir untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan satu data menara telekomunikasi. Timbal balik antara pemerintah daerah dengan provider sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan kegiatan ini.

PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) menyampaikan bahwa data menara dikonfirmasi sebaiknya disampaikan terlebih dahulu kepada provider karena dimungkinkan ada akuisisi yang dilakukan antar sesama provider. Data yang ada akan diupdate tiap awal tahun sebelum dilakukan penagihan SKRD.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi yang diwakili oleh Bapak Is Subandi Priyatno sebagai Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) mengikuti zoom tidak sampai akhir acara karena beliau sedang perjalanan keluar kota, terkendala jaringan telekomunikasi yang kurang baik. Beliau mengirimkan tanggapan melalui pesan WA "*BPS sangat mendukung kegiatan penyusunan satu data menara*"

telekomunikasi yang mana kegiatan ini sangat bermanfaat untuk satu data Kabupaten Ngawi, selama ini data menara telekomunikasi belum pernah tersaji di Ngawi Dalam Angka.”



*Foto 54.
Tanggapan BPS Kab. Ngawi melalui WA*

c) Membuat kesepakatan bersama

Di akhir acara pemimpin rapat sebagai pemimpin aksi perubahan menutup rapat dengan pernyataan kesepakatan antara para peserta rapat. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang di tandatangani oleh peserta rapat. Berita acara dimaksud adalah sebagai berikut

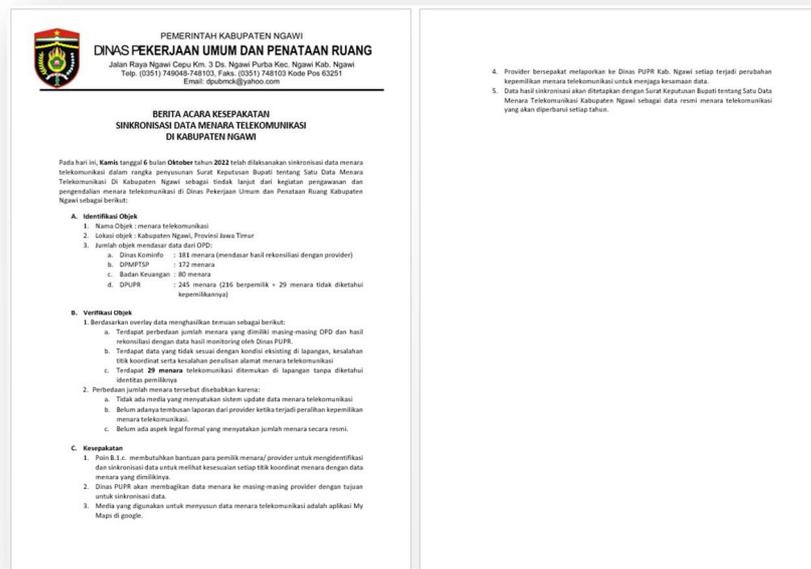


Foto 55.
Draft Berita Acara Kesepakatan

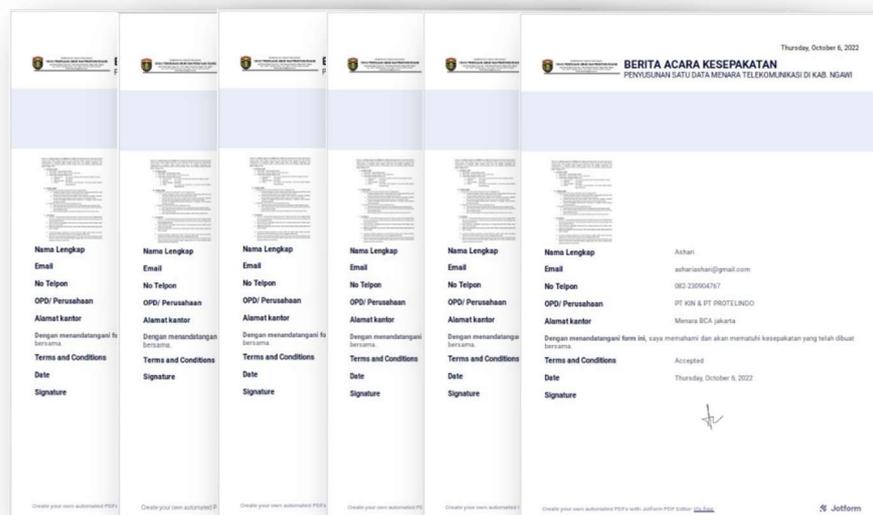


Foto 56.
Berita Acara Kesepakatan

Di atas merupakan Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh peserta rapat sebagai bentuk komitmen terhadap hasil rapat pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 ini.

Sebagai tindak lanjut dari acara rapat, pada hari itu Kamis tanggal 6 Oktober 2022 dibuat group WA Menara Telekomunikasi Kabupaten Ngawi. Anggota group sejumlah 18 orang terdiri dari beberapa OPD dan semua provider yang memiliki menara di wilayah Kabupaten Ngawi.

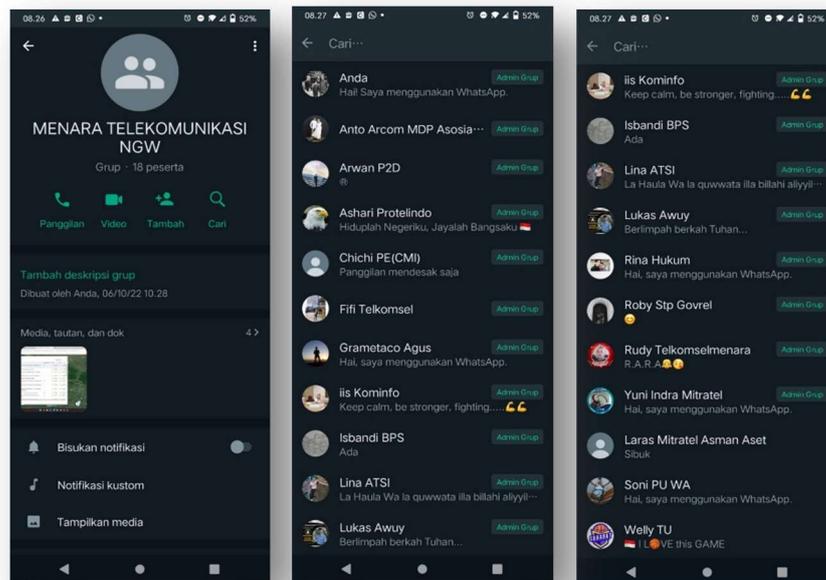


Foto 57.
Group WA menara telekomunikasi Kab. Ngawi

Harapan pemimpin perubahan dengan adanya WA group yang beranggotakan semua provider dan OPD terkait menara telekomunikasi akan memudahkan komunikasi dan koordinasi permasalahan menara telekomunikasi di Kabupaten Ngawi.

7) Penyusunan SK Bupati satu data menara telekomunikasi

a) Penyusunan draft SK satu data menara telekomunikasi

Tindak lanjut dari acara rapat koordinasi yaitu tim administrasi/hukum menyusun draft SK Bupati Satu Data Menara Telekomunikasi pada tanggal 7 Oktober 2022. Draft SK dimaksud adalah sebagai berikut.

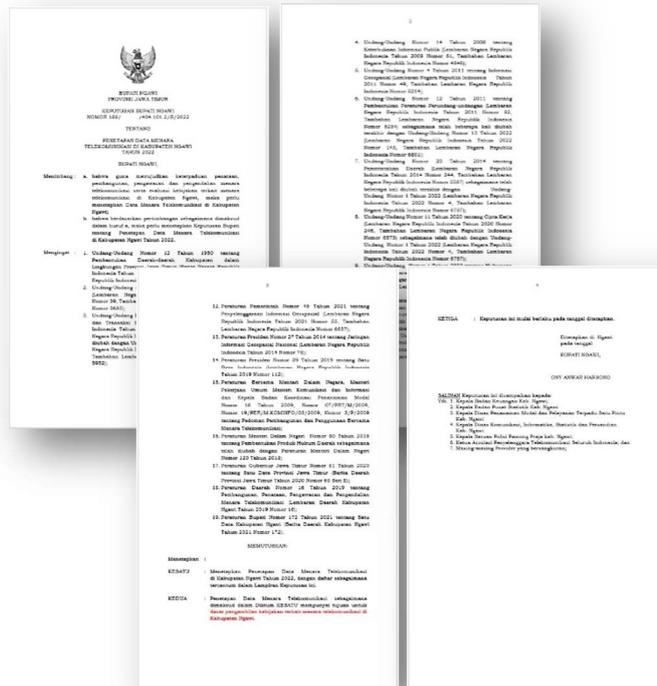


Foto 58
Draft SK Bupati Satu Data Menara Telekomunikasi

Berikut adalah lampiran draft SK yang merupakan data keseluruhan menara telekomunikasi yang teridentifikasi di tahun 2022 ini.



Foto 59.
Lampiran Draft SK Bupati Satu Data Menara Telekomunikasi

Setelah draft diperiksa oleh pemimpin aksi perubahan, maka dibuatlah surat pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi pada tanggal 10 Oktober 2022.

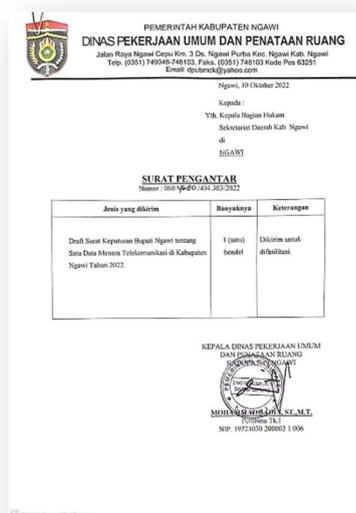


Foto 60.

Surat Pengantar SK Bupati Satu Data Menara Telekomunikasi

b) Penetapan SK Satu Data Menara Telekomunikasi

Pada tanggal 27 Oktober 2022 Bupati Ngawi Bapak Ony Anwar Harsono menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang Satu Data Menara Telekomunikasi Kabupaten Ngawi Tahun 2022. Pada akhirnya pemerintah daerah Kabupaten Ngawi memiliki produk hukum yang sah terkait data menara yang bisa dimanfaatkan semua OPD dan masyarakat umum. Foto SK yang telah ditandatangani adalah sebagai berikut.

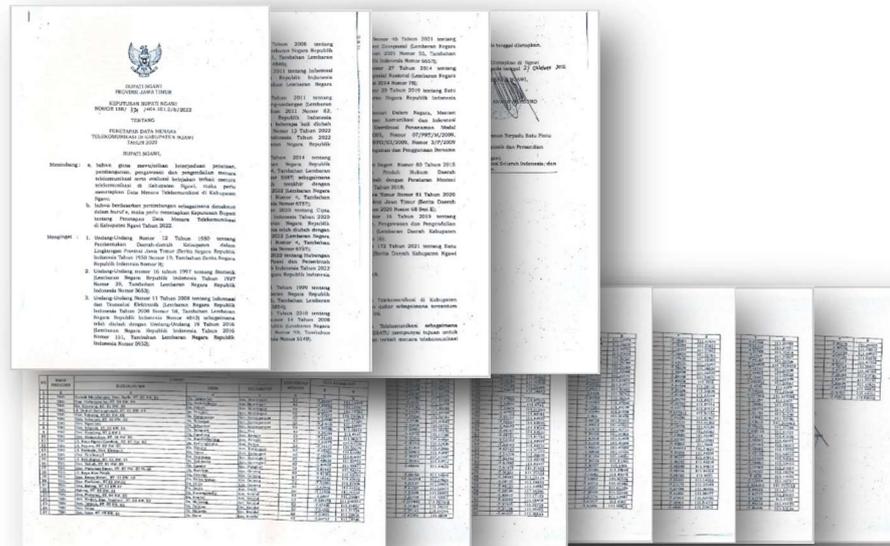


Foto 61.
SK Bupati Satu Data Menara Telekomunikasi

c) Publikasi hasil inovasi

Untuk menyebarkan informasi kepada semua pihak dan masyarakat umum maka hasil inovasi berupa SK Bupati Satu Data Menara Telekomunikasi, peta online My Maps Menara Telekomunikasi, dan informasi grafis menara telekomunikasi diunggah di website Dinas PUPR Kabupaten Ngawi dan Portal Data Ngawi. Akan tetapi karena Portal Data Ngawi sifatnya adalah capaian kegiatan maka data yang telah diinput akan secara otomatis muncul oleh sistem di bulan Desember 2022. Berikut adalah tangkapan layar data menara telekomunikasi di website Dinas PUPR dan Portal Data Ngawi.

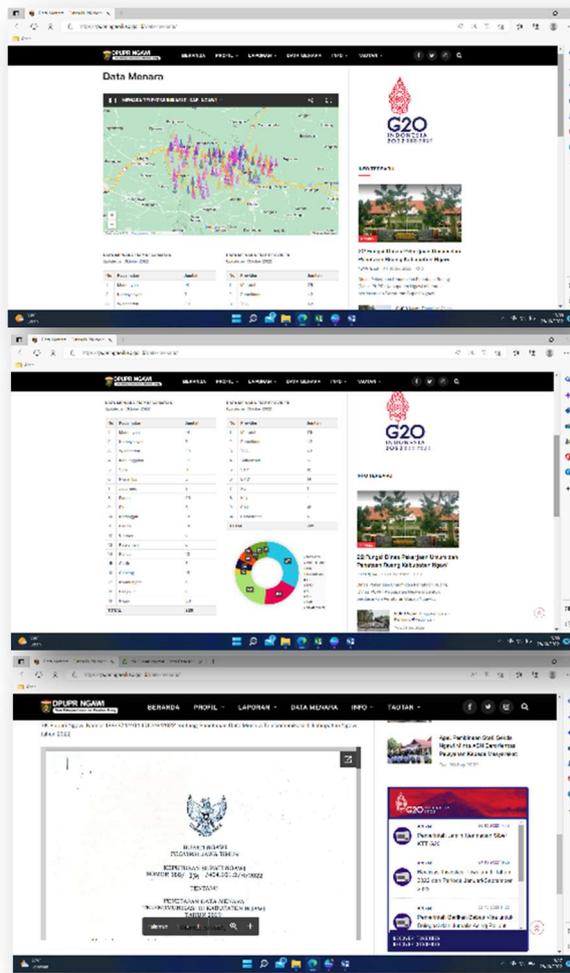


Foto 62. Publikasi Data menara di website Dinas PUPR

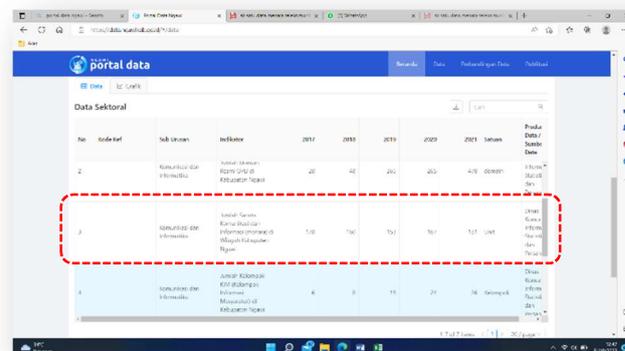


Foto 63. Data menara di Portal Data Ngawi

b. Deskripsi Kepemimpinan

Capaian dalam perbaikan kinerja organisasi yang ditunjukkan dalam deskripsi capaian hasil perubahan di atas bisa terwujud dengan adanya kemampuan pemimpin aksi perubahan mengaktualisasikan kepemimpinan transformasional pada saat implementasi aksi perubahan. Prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional yang dimaksud dijelaskan dalam matriks sebagai berikut:

*Tabel 4.
Prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional*

No	Prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional	Penerapan dalam aksi perubahan	Eviden
1	<p>Simplifikasi : pemimpin harus dapat mengungkapkan visinya secara jelas, praktis, dan transformasional, sebagai arah pergerakan organisasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aksi perubahan ini memiliki visi/ tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kepatuhan para pemilik menara terhadap aspek hukum yang berlaku di Kabupaten Ngawi. - Dampak yang diharapkan bagi organisasi sendiri adalah tidak terjadi kebocoran potensi PAD melalui pendataan yang baik. - Cita-cita pemimpin aksi perubahan adalah melalui penyusunan satu data menara telekomunikasi ini akan membantu 	<ul style="list-style-type: none"> - SK Satu Data menara telekomunikasi Kab. Ngawi Tahun 2022 - Peta Online My Maps sebagai sarana yang efektif untuk mendata menara - Berita Acara Kesepakatan untuk meng-update data menara setiap tahun dalam bentuk SK Bupati

		mewujudkan Satu Data Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.	
2	Motivasi : sebuah kemampuan untuk mendapatkan komitmen semua orang yang terlibat terhadap visi.	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai perwujudan komitmen bersama, dibentuklah tim efektif sebagai tim yang mendukung aksi perubahan dengan motivasi dan persepsi yang sama dalam rangka mencapai visi. - Tim menara telekomunikasi diberikan insentif sesuai dengan target yang dicapai dari retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sesuai hasil pendataan yang valid. - Tim survey diberikan tantangan untuk semakin menemukan banyak menara yang belum terdata sebelumnya, sehingga hasil kerjanya akan mendapatkan penghargaan dari pimpinan karena memberikan hasil nyata. 	<ul style="list-style-type: none"> - SK Tim Efektif - SK penerima insentif - Penambahan jumlah menara secara signifikan dari jumlah yang diserahkan Kominfo

3	<p>Fasilitasi : Kemampuan untuk secara efektif memfasilitasi “pembelajaran” yang terjadi di dalam organisasi secara kelembagaan, kelompok, ataupun individual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap tim difasilitasi dengan sumberdaya material, anggaran, penghargaan dan sebagainya yang dibutuhkan untuk melakukan tugasnya sesuai tahapan. - Tim efektif disediakan sarana, misal: kendaraan operasional, laptop yang mumpuni, uang perjalanan dinas dan uang harian, serta drone sebagai alat monitoring menara. - Dilakukan pelatihan pemetaan online My Maps dan menyarankan belajar melalui ruang pembelajaran Google Educator Group Asia Pacific Connect untuk mengupdate skill. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya anggaran perjalanan dinas untuk survey menara telekomunikasi - Tersedianya laptop, mobil operasional, drone. - Diadakan bimtek pengenalan aplikasi My Maps
4	<p>Inovasi : kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, mengimplementasikan ide baru yang bermanfaat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aksi perubahan ini didasari ide untuk memanfaatkan peta my maps dalam rangka pendataan menara telekmunikasi untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Online My Maps

		mewujudkan satu data menara telekomunikasi sehingga tersedia data yang presisi/ valid untuk meminimalisir kehilangan potensi PAD.	
5	Mobilitas : Pengerahan seluruh sumber daya yang ada untuk melengkapi dan memperkuat setiap orang yang terlibat di dalamnya dalam mencapai visi dan misi organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajak tim bergerak menyisir seluruh wilayah dan berkoordinasi dengan pihak desa sebagai pemilik wilayah untuk menemukan semua titik menara di tiap wilayah. - Membentuk grup WA yang beranggotakan semua provider dan OPD terkait untuk memudahkan koordinasi. - Menyusun kesepakatan bersama, mengajak semua provider berkomitmen menjaga kelanjutan kesamaan data dengan cara melaporkan setiap terjadi akuisisi menara maupun pembongkaran menara. - Menggerakkan semua OPD untuk menindaklanjuti temuan selisih data menara 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim melakukan survey ke lapangan - Group Wa menara telekomunikasi kabupaten Ngawi - Berita Acara Kesepakatan - Menyampaikan SK Satu data menara kepada semua OPD terkait

		sesuai kewenangan urusan masing-masing.	
6	Open Mind : kemampuan untuk selalu membuka diri untuk menerima masukan dan saran dalam menyambut perubahan dengan paradigma baru yang positif.	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka peluang perbaikan pendataan menara telekomunikasi yang bisa disampaikan melalui grup WA menara telekomunikasi dan forum rekonsiliasi yang akan diadakan rutin setiap tahun. - Data menara diunggah dalam website DPUPR dan Portal Data Ngawi yang bisa diakses langsung oleh masyarakat, serta masyarakat bisa memberikan masukan atau respon melalui pengaduan yang disediakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - WA Group menara telekomunikasi - Publikasi di website
7	Memiliki tekad yang kuat : tekad seorang pemimpin untuk menyelesaikan hingga tuntas.	<ul style="list-style-type: none"> - Setelah target jangka pendek tercapai, pemimpin aksi perubahan tidak berhenti sampai disitu, akan tetapi harus melanjutkan aksi perubahan untuk mewujudkan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen untuk memperbarui SK satu data menara setiap tahun.

2. Manfaat Aksi Perubahan

Harapan dari pemimpin aksi perubahan, terobosan/ inovasi yang diusung ini akan membawa manfaat bagi organisasi sendiri maupun bagi masyarakat luas. Secara umum manfaat aksi perubahan ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

a. Manfaat internal

1) Adanya satu data menara telekomunikasi.

Dinas PUPR Kabupaten Ngawi akan memiliki data yang presisi terkait menara telekomunikasi yang akan sangat bermanfaat untuk dasar kegiatan di Dinas PUPR.

2) Sebagai alat bantu monitoring.

Dengan adanya satu data menara telekomunikasi akan memudahkan tim di Dinas PUPR melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, sehingga tidak ada satu pun menara yang tidak terjangkau pengawasan tim.

3) Sebagai bahan untuk evaluasi.

Satu data menara telekomunikasi merupakan data dinamis yang diupdate setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Dinas PUPR dalam rangka evaluasi kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan kegiatan terkait.

4) Terbentuknya jejaring kerja antar stakeholder.

Dalam rangka penyusunan satu data menara telekomunikasi akan terbentuk jejaring kerja yang aktif dan solid antara Dinas PUPR dengan OPD lainnya sehingga akan makin memudahkan DPUPR dalam mencapai tujuan organisasi.

b. Manfaat eksternal

1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Dengan adanya satu data menara telekomunikasi tidak akan terjadi perbedaan persepsi terkait data menara sehingga

kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah akan meningkat.

- 2) Menjadi basis data bagi Organisasi Perangkat Daerah.
 Satu data menara telekomunikasi akan menjadi basis data semua OPD yang membutuhkan untuk keperluan masing-masing OPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 3) Memudahkan semua OPD dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang valid.
 Satu data menara yang dipublikasikan kepada OPD dan masyarakat melalui website DPUPR dan Portal Data Ngawi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan memudahkan semua OPD dan masyarakat mendapatkan informasi yang valid terkait data menara telekomunikasi.
- 4) Mempermudah sistem pertukaran informasi.
 Database menara telekomunikasi yang dituangkan dalam peta online My Maps akan lebih memudahkan semua pihak yang membutuhkan untuk saling bertukar informasi karena data dalam bentuk grafis akan lebih mudah dibaca dan dianalisa.
- 5) Sebagai bahan evaluasi.
 Satu data menara telekomunikasi dapat dimanfaatkan semua OPD serta provider untuk mengevaluasi program kegiatan maupun kebijakan terkait menara telekomunikasi.

C. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

1. Penyampaian hasil inovasi

Terobosan yang dilakukan pemimpin aksi perubahan telah mencapai tujuan jangka pendek yaitu terwujudnya Surat Keputusan Bupati tentang Satu Data Menara Telekomunikasi di Kabupaten Ngawi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya tuntutan perubahan yang terjadi di depan yang juga menuntut perubahan terhadap inovasi yang dilakukan pada saat ini. Sebagai tindak lanjut

dari tahapan jangka pendek, untuk menjamin keberlanjutan inovasi yang dihasilkan, maka SK Satu Data Menara Telekomunikasi tersebut disampaikan kepada semua OPD terkait untuk ditindaklanjuti sesuai urusan dan kewenangannya. Selain itu juga SK Bupati dan data menara telekomunikasi tersebut diunggah pada website DPUPR dan Portal Data Ngawi. Inovasi tersebut juga didukung oleh stakeholder lain untuk menunjang program kegiatan yang diampu masing-masing.

2. Dukungan Stakeholders Eksternal

Stakeholder eksternal sangat menyambut baik aksi perubahan yang dihasilkan berupa SK Bupati Satu Data Menara Telekomunikasi. Dukungan dinyatakan melalui video testimoni serta surat pernyataan dukungan atas aksi perubahan yang dilakukan Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi. Berikut adalah foto-foto dukungan dari stakeholder eksternal.



*Foto 64.
Dukungan dari Bupati Ngawi*



Foto 65.
Dukungan dari Wakil Bupati Ngawi



Foto 66.
Dukungan dari Badan Keuangan Kab. Ngawi



Foto 67.
 Dukungan dari Satpol PP Kab. Ngawi



Foto 68.
 Dukungan dari DPMPTSP Kab. Ngawi



*Foto 69.
Dukungan dari BPS Kab. Ngawi*

Harapan ke depannya inovasi yang telah dilakukan ini akan terus berlanjut, dan terus terjadi sinergitas antar stakeholder sehingga semakin mendukung keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Ngawi.

3. Rencana di Tahap Jangka Menengah

Pada tahap jangka menengah dilakukan di tahun 2023 ditetapkan tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi melalui penelusuran potensi pajak dan retribusi yang hilang karena menara telekomunikasi yang tidak terdata dengan baik serta melakukan evaluasi atas pemanfaatan satu data menara telekomunikasi. Menurut hasil perhitungan proyeksi untuk Pajak Bumi dan Bangunan akan bertambah sejumlah Rp. 81.950.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan asumsi pajak rata-rata per-menara adalah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan dari sisi retribusi pengawasan menara

telekomunikasi terproyeksi akan bertambah Rp.159.024.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan tarif flat retribusi menara yaitu Rp.3.313.000,00.

4. Rencana di Tahap Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang rencana aksi perubahan setelah tahun 2023 adalah untuk meningkatkan kepatuhan para pemilik menara telekomunikasi terhadap aspek hukum di Kabupaten Ngawi serta melakukan penyempurnaan pemanfaatan satu data menara telekomunikasi. Kepatuhan yang dimaksud adalah kepatuhan dari sisi aturan tata bangunan, dari aspek pajak dan retribusi, serta dari aspek perijinan.

DAFTAR PUSTAKA

Endik. 2021, November 2. Sosialisasi Perbup No. 172 Tahun 2021, Bupati Ngawi Berkomitmen Selenggarakan Satu Data. [Sosialisasi Parbup Nomor 172 Tahun 2021, Bupati Ngawi Berkomitmen Selenggarakan Satu Data - ARYA-MEDIA | Majalah & Media Online](#)

Mifta.(2021,November 15). Beda Data Menara BTS di KOMINFO Dan DPMPTSP. Diakses dari <http://nenemonews.com/2021/11/15/beda-data-menara-bts-di-kominfo-dan-dpmptsp/>

Mifta.(2021,November 15). Dinas Kominfo Bantah Pernyataan Kepala DPMPTSP. Diakses dari <https://redaksi.duta.co/dinas-kominfo-bantah-pernyataan-kepala-dpmptsp/>

Sylke Febrina Laucereno.(2022,Agustus 2). Melesat Tinggalkan Kompetitor, Mitratel Kini Kuasai 35.000 Tower BTS. Diakses dari <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-6212493/>

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 065/918/114.2/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal Penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pembangunan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

PermenPANRB Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Menara telekomunikasi